

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SETELAH PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN BLORA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



**Shoimul Kharimah**

NIM: 1705046053

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Shoimul Kharimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Shoimul Kharimah

NIM : 1705046053

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Di Kabupaten Blora

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 April 2021

Pembimbing I

  
**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag**

NIP. 19700410 199503 001

Pembimbing II

  
**Fajar Adhitya, S.Pd. MM**

NIP. 19891009 201503 1 003

## PENGESAHAN

Nama : Shoimul Kharimah

NIM : 1705046053

Judul : **Analisis Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintahan di Kabupaten Blora**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, baik, cukup baik, pada tanggal

**26 April 2021**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021.

Semarang, 26 April 2021

### Mengetahui

Ketua Sidang

**Warno, SE., M.Si.**

NIP. 19830721 201503 1 002

Penguji I

**Dr. H. Muhlis, M.Si.**

NIP. 19610117 198803 1 002

Dosen Pembimbing I

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**

NIP. 19700410 199503 001

Sekretaris Sidang

**Fajar Adhitva, S.Pd. MM.**

NIP. 19891009 201503 1 003

Penguji II

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**

NIP. 19710830 199803 1 003

Dosen Pembimbing II

**Fajar Adhitva, S.Pd. MM.**

NIP. 19891009 201503 1 003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....(Al-Baqarah:282).

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ  
عَدُوًّا مُّبِينًا.....

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia... (Al-Isra:53)

“Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia”

-Abu Bakar As-Siddiq-

“Setiap segala sesuatu itu ada kelebihanannya. Maka janganlah suka meremehkan dan merendahkan”

-Abu Bakar As-Siddiq-

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul akhir. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Pahlawanku yaitu kedua orang tua saya, Bapak Rusdi dan Ibu Musripah.
2. Kakak-kakak saya, Syahid, Nikmah, Aji, Nisa, Gholib, Ria, dan para keponakanku yang lucu dan imut.
3. Seluruh teman penulis yang selalu menghibur dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kalian selalu dipermudah dalam segala urusan.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 April 2021

Deklarator,

**Shoimul Kharimah**

1705046053

## TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini pedoman transliterasi:

### a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A



◌ِ	kasrah	I	I
◌ُ	dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ ... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ ... و	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ.. ا.. ◌ُ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِ ... ◌ُ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُ ... ◌ُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### d. Ta Marbuṭah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbuṭah hidup transliterasinya adalah *t*.

Contoh: روضة الأطفال dibaca rauḍatul atfāl

2. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: روضة الأطفال dibaca rauḍah al- atfāl

3. Ta marbuṭah yang diikuti kata sandang *al*

Contoh: المدينة المنورة dibaca al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا dibaca rabbanā

نزل dibaca nazzala

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: ءافشلا dibaca asy-syifā

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: القلم dibaca al-qalamu

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون dibaca ta'khuḏūna

النوء dibaca an-nau'

شيء      dibaca syai'un

ان        dibaca inna

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان اللطه وخير الرازقين:      dibaca innallāha lahuwa khairarrāziqīn

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora antara sebelum dan setelah menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2011-2020 ditinjau dari rasio : (1) Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, (2) Rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Rasio efisiensi pendapatan daerah. Basis akrual merupakan sistem pencatatan akuntansi dimana pencatatan dilakukan saat terjadi peristiwa meskipun belum ada kas yang diterima maupun dikeluarkan. Penerapan basis akrual di sektor publik bertujuan untuk untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang lebih transparan, akuntabilitas, dan kemandirian keuangan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan. Kebijakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual termuat dalam PP No.71 tahun 2010, Permendagri No. 64 tahun 2013 dan Perbup no. 53 tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan dan menganalisis kinerja keuangan antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dan rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Namun kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

**Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Rasio Keuangan**

## **ABSTRACT**

*This study aims to compare the financial performance of the Blora district government between before and after implementing accrual-based government accounting standards (SAP) in 2011-2020 in terms of the ratio: (1) the ratio of local government financial independence, (2) the ratio of effectiveness in realizing local revenue , (3) Regional revenue efficiency ratio. Accrual basis is an accounting recording system where records are made when an event occurs even though no cash has been received or disbursed yet. The application of the accrual basis in the public sector aims to create a more transparent government financial performance, accountability, and regional financial independence in managing government affairs. The policy for implementing accrual-based government accounting standards is contained in PP No. 71/2010, Permendagri No. 64 of 2013 and Perbup no. 53 of 2015. This type of research is a comparative descriptive study. This study is to compare and analyze financial performance between before and after the application of accrual-based government accounting standards. The results of this study state that financial performance in terms of the ratio of financial independence of local governments and the ratio of effectiveness in realizing local revenue there is a significant difference between before and after the application of accrual-based government accounting standards (SAP). However, financial performance in terms of efficiency ratios, there is no significant difference between before and after the application of accrual-based government accounting standards (SAP).*

**Keywords: Financial Performance, Accrual-Based Government Accounting Standards, Financial Ratios**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali berasal dari-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Di Kabupaten Blora” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan, saran, dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, SE., M.Si selaku Sekjur Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., MM selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan serta saran dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak H. Muhammad Fauzi, SE., MM selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat.

8. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan Skripsi ini.
9. Bapak, Ibu, Kakak dan para keponakanku tercinta yang telah membesarkan dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anak-anaknya.
10. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora beserta jajarannya terkhusus Ibu Diana dan Bapak Danang yang telah bersedia memberikan kesempatan waktu, data, informasi dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada disampingku baik dalam suka maupun duka.
12. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan saran dalam pembuatan skripsi ini baik dari segi moral maupun materill yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisannya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, 22 April 2021

Shoimul Kharimah

**1705046053**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Regulasi.....	11
2. Teori Legitimasi.....	11
3. Dasar Pencatatan Akuntansi .....	11
4. PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)....	14
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah .....	17
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora .....	17
7. Kinerja Keuangan Pemerintah .....	19
B. Kerangka Teori.....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	22
D. Hipotesis Penelitian .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Sumber Data.....	26



C. Populasi dan Sampel .....	26
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	26
E. Teknik Analisis Data.....	30
1. Uji Normalitas.....	30
2. Uji Hipotesis .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum.....	33
B. Deskripsi Data Penelitian.....	33
C. Uji Data.....	37
D. Pembahasan.....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DAN RISET .....</b>	<b>52</b>
<b>SURAT IZIN RISET .....</b>	<b>54</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN 2011-2020.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan keuangan pemerintah kabupaten Blora tahun 2016-2019 .....	5
Tabel 3.1. Periode Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Blora .....	27
Tabel 3.2. Kriteria Kemandirian Dalam Merealisasikan PAD .....	28
Tabel 3.3. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah .....	29
Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah .....	30
Tabel 4.1. Kinerja Keuangan Sebelum Penerapan Basis AkruaI .....	34
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif (Kinerja Keuangan Sebelum Penerapan Basis AkruaI)....	35
Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Basis AkruaI .....	36
Tabel 4.4. Statistik Deskriptif (Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Basis AkruaI).....	37
Tabel 4.5. Uji Normalitas Data Sebelum Penerapan Basis AkruaI .....	39
Tabel 4.6. Uji Normalitas Data Setelah Penerapan Basis AkruaI.....	39
Tabel 4.7. <i>Paired Sample T-Test</i> ( Rasio Kemandirian Sebelum Dan Setelah Penerapan Basis AkruaI) .....	41
Tabel 4.8. <i>Paired Sample T-Test</i> ( Rasio Efektivitas Sebelum dan Setelah Penerapan Basis AkruaI) .....	42
Tabel 4.9. <i>Paired Sample T-Test</i> (Rasio Efisiensi Sebelum Dan Setelah Penerapan Basis AkruaI) .....	43
Tabel 4.10. Tabel Perbandingan Rasio Kemandirian Sebelum Dan Setelah Penerapan Basis AkruaI.....	44
Tabel 4.11. Tabel Perbandingan RasioEfektivitas Sebelum Dan Setelah Penerapan Basis AkruaI.....	45
Tabel 4.12. Tabel Perbandingan Rasio efisiensi Sebelum Dan Setelah Penerapan Basis AkruaI.....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Akuntansi merupakan seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh transaksi ekonomi yang dibuat dalam suatu laporan keuangan. Dalam menjalankan roda organisasi tentu sangat penting adanya laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan bisa dilihat bagaimana organisasi tersebut tetap bisa eksis dan berkembang atau bahkan sebaliknya. Fungsi dari laporan keuangan sangat banyak. Diantaranya untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan, selain itu dari laporan keuangan juga bisa dilihat bagaimana kinerja organisasi berjalan. Pengguna laporan keuangan sendiri diklasifikasikan menjadi dua bidang utama, yaitu organisasi sektor private dan organisasi sektor publik.<sup>1</sup> Organisasi sektor private yaitu organisasi yang yang aktivitas ekonominya berorientasi pada laba. Sedangkan organisasi sektor publik yaitu organisasi yang bersifat nirlaba atau orientasinya bukan pada laba melainkan pelayanan kepada masyarakat, seperti: Pemerintah, LSM, dan Yayasan. Namun bukan berarti sektor publik tidak mencari laba melainkan laba yang diperoleh juga digunakan kembali untuk pelayanan kepada masyarakat.

Baik organisasi sektor private maupun organisasi publik, keduanya sama-sama membutuhkan laporan keuangan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan keuangan. Secara umum laporan keuangan dicatat menggunakan dua basis yaitu basis kas dan basis akrual.<sup>2</sup> Basis kas merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi, dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Sedangkan basis akrual merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Pada basis akrual pendapatan dicatat saat terjadinya transaksi meskipun belum ada kas yang diterima, sedangkan biaya dicatat saat biaya tersebut

---

<sup>1</sup> Joko Purnomo, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)", *Among Makarti*, Vol.7 No.13, 2014. hlm.84..

<sup>2</sup> Dwi Amalia, "[https:// www.jurnal.id/](https://www.jurnal.id/)". (diakses pada 31 Maret 2020).

digunakan meskipun belum mengeluarkan kas. Dan pendapatan penjualan dicatat saat terjadinya penjualan, meskipun belum ada kas yang diterima.

Awal pencatatan sistem akuntansi berbasis akrual pertama kali hanya diterapkan oleh sektor private atau sektor swasta. Penggunaan akuntansi berbasis akrual pada sektor private mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba, karena dalam pencatatan akuntansi dengan basis akrual memberikan gambaran terkait penyajian informasi keuangan yang lebih informatif. Selain itu pencatatan akuntansi dengan menggunakan basis akrual juga memberikan gambaran yang utuh terhadap posisi keuangan. Penyajian posisi keuangan yang lebih detail dan informasi keuangan yang lebih lengkap dapat membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, tidak hanya sektor private yang menerapkan sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual, namun sektor publik juga beralih dari sistem pencatatan akuntansi berbasis kas menjadi sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual. Beralihnya sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik tujuan utamanya bukan untuk memaksimalkan laba seperti sektor private, tetapi bukan berarti sektor publik tidak mencari laba melainkan bertujuan untuk menyusun kinerja keuangan yang lebih baik, yaitu melalui penentuan biaya pelayanan kepada publik, efisiensi, dan pencapaian tujuan pada organisasi sektor publik dalam periode akuntansi.<sup>4</sup> Pencatatan akuntansi berbasis akrual juga bertujuan untuk membantu dan memfokuskan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik.<sup>5</sup> Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan salah satu metode yang digunakan pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, dengan diterapkannya SAP berbasis akrual diharapkan setiap daerah mampu mengelola keuangannya lebih baik dan mandiri.

Sistem pencatatan SAP berbasis akrual pertama kali diterapkan oleh Chile pada masa kekuatan rezim Pinochet, selanjutnya penerapan SAP berbasis akrual diterapkan di beberapa negara-negara lain seperti New Zealand pada tahun 1990, Amerika Serikat pada

---

<sup>3</sup> Inessa Trihani, "Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah", *Jurnal Artikel*, 2017, hlm.5.

<sup>4</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor publik", (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2018, hlm.11.

<sup>5</sup> Ratno Agriyanto, dkk, "Model of Prediction of Behavioral Use of Accrual Basis Accounting Information on Local Governments in Indonesia", *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2017, hlm.7280.

tahun 1997, Inggris pada tahun 2001, dan Kanada pada tahun 2003. Keberhasilan yang telah dicapai New Zealand dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat terlihat dengan semakin banyaknya negara berkembang yang ikut serta menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.<sup>6</sup> Meningkatnya jumlah negara yang mulai menerapkan SAP berbasis akrual tidak lepas dari manfaat yang diterima dari penerapan SAP berbasis akrual. Manfaat penerapan SAP berbasis akrual bagi pengguna laporan keuangan yaitu: a) menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh entitas, b) menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, c) pengambilan keputusan mengenai sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas. Sedangkan laporan keuangan yang disusun dengan menerapkan SAP berbasis akrual akan memudahkan para pengguna informasi untuk: a) membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya, b) menilai kinerja posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah, c) menilai sekaligus mengevaluasi pemerintah atas kegiatan yang didanainya serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, d) melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, e) serta menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.<sup>7</sup>

Sejarah awal penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Indonesia dimulai tahun 2005 dan peraturan tersebut masih bersifat sementara. Regulasi tersebut tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.<sup>8</sup> Kemudian peraturan tersebut disusul dari komitmen untuk menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara penuh dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, penerapan laporan keuangan yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas dan perwujudan *good governance* serta

---

<sup>6</sup>Dwi Priyo Atmojo, "Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Sebelum Dan Setelah Penerapan Accrual Based", *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 2016, hlm.2.

<sup>7</sup>Riri Zelmianti, "Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Sekor Pemerintahan di Indonesia", *JRAK* Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 69.

<sup>8</sup>Iput Diyah Susanti, "Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur)", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan* Vol. No. 1. 2015, hlm.53.

mengetahui kualitas kinerja pemerintah melalui laporan keuangan yang disajikan. Berubahnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari basis kas menjadi basis akrual juga merubah jumlah laporan keuangan yang semula hanya 4 (empat) laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan bertambah 3 laporan keuangan yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih. Menurut Der Hoek (2005) yang dikutip dalam jurnal Ainul Ridha bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual akan memberikan manfaat antara lain mendukung kinerja pemerintah, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).<sup>9</sup>

Selain peraturan dari Pemerintah Pusat, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 juga membahas tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Setiap kepala daerah diberi wewenang untuk membuat kebijakan penerapan SAP berbasis akrual tetapi tetap harus berpedoman dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. Sesuai dengan hak dan wewenang atas pemberian kebebasan bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Jawa Tengah kabupaten/kota yang pertama kali menerapkan SAP berbasis akrual ialah kota Semarang. Kota Semarang mulai menerapkan sistem akrual sejak tahun 2001. Namun dalam proses penerapannya tersebut dilakukan masih secara bertahap pada laporan keuangan yang disajikan. Dan pada tahun 2014 kota Semarang berhasil menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan yang disusunnya.<sup>10</sup> Pada tahun 2017 kota Semarang juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang sudah mencapai tingkat rasio kemandirian diatas

---

<sup>9</sup> Ainul Ridha, “Pengaruh Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Aceh”, *Jurnal Simen*, 2018, hlm. 2.

<sup>10</sup> Admin Diklat, [Http://Diklat.Semarangkota.Go.Id](http://Diklat.Semarangkota.Go.Id), (Diakses Pada 18 Desember 2020).

50%.<sup>11</sup> Selain kota Semarang, kabupaten Boyolali juga mulai menerapkan basis akrual pada tahun 2014.<sup>12</sup> Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual di kota Semarang dan kabupaten Boyolali kemudian diikuti penerapan SAP berbasis akrual oleh kota-kota di Jawa Tengah mengikuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan dan mengikuti Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa setiap kepala daerah diberi wewenang untuk membuat kebijakan terkait penerapan SAP berbasis akrual. Pemerintah kota Blora mengeluarkan kebijakannya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora. Dalam peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa semua transaksi akuntansi yang terjadi dilingkungan pemerintah kabupaten Blora harus menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Peraturan tersebut mulai berlaku dan harus diterapkan sejak tanggal ditetapkannya oleh kepala daerah yaitu pada tanggal 7 Desember 2015.<sup>13</sup>

Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai PERBUP-53-2015 yaitu untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang mandiri, transparansi, dan akuntabilitas. Pada tahun 2016, kota Blora sudah mulai menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Berikut merupakan data keuangan kabupaten Blora tahun 2016-2019:

**Tabel 1.1**

Laporan keuangan pemerintah kabupaten Blora tahun 2016-2019

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>1.858.187.916.237</b>	<b>2.013.829.444.230</b>	<b>2.120.671.434.967</b>	<b>2.240.970.020.181</b>
	- pend. asli daerah	171.277.522.706	280.042.019.102	203.182.795.054	246.863.066.484
	- pend. Transfer	1.518.683.687.233	1.518.790.298.934	1.607.847.575.930	1.631.536.944.197
	- Lain” pend. yg sah	168.226.706.296	214.997.126.19	309.641.063.983	362.570.009.500
2.	<b>Belanja</b>	<b>2.087.573.699.546</b>	<b>1.975.921.281.358</b>	<b>2.110.687.561.459</b>	<b>2.201.539.935.903</b>

<sup>11</sup> Noor Farieda Awwaliyah, dkk, "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance", *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2019, hlm.28.

<sup>12</sup> Ratno Agriyanto, "Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 15 No. 01, hlm.78.

<sup>13</sup> PERBUP,2015, NO.53.

	- belanja operasi	1.637.367.627.779	1.555.056.725.336	1.611.247.782.326	1.728.710.689.895
	-belanja modal	449.206.071.767	420.864.556.022	499.439.779.133	466.887.346.008
	-belanja tdk terduga	1.000.000.000	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Transef bagi hasil ke desa</b>	<b>6.093.261.000</b>	<b>5.426.200.000</b>	<b>5.788.000.000</b>	<b>5.941.900.000</b>
<b>4.</b>	<b>Pembiayaan (surplus/defisit)</b>	<b>137.276.763.840</b>	<b>31.003.715.890</b>	<b>59.608.030.710</b>	<b>58.422.607.092</b>
	- Penerimaan daerah	139.509.763.840	43.734.715.890	63.608.030.710	63.922.107.092
	- SILPA	139.318.488.840	43.648.225.790	63.485.678.762	63.802.556.826
	- Penerimaan kembali dana bergulir	191.275.000	86.490.100	122.351.948	119.550.266
<b>5.</b>	<b>Pengeluaran daerah</b>	<b>2.233.000.000</b>	<b>12.731.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>5.499.500.000</b>
	- Penyetoran modal (investasi)pemerintah daerah	2.233.000.000	12.731.000.000	4.000.000.000	5.499.500.000

*Sumber: BPPKAD kabupaten Blora tahun 2016-2019.*

Sesuai dengan tujuan penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu untuk mewujudkan kinerja keuangan pemerintah yang lebih mandiri. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Kemandirian daerah juga dapat dilihat dari besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dibanding dengan penerimaan dari transef pusat. Di Blora setelah penerapan basis akrual pada tahun 2016 hingga tahun 2019 pendapatan kabupaten Blora mengalami peningkatan. Pendapatan tersebut akumulasi dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Berbanding terbalik dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, pendapatan asli daerah masih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016-2017 pendapatan asli daerah kabupaten blora mengalami kenaikan sebesar 1,635%. Namun pada tahun 2018 pendapatan asli daerah kabupaten blora mengalami penurunan sebesar 1,378%. Kemudian pada tahun 2019 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan lagi sebesar 1,214%.

Selain pendapatan daerah, belanja daerah secara umum juga mengalami kenaikan, namun pada tahun 2017 belanja daerah mengalami penurunan sebesar 1,056% dari jumlah belanja daerah tahun 2016. Menurunnya belanja daerah pada

<sup>14</sup> BPPKAD, <http://bpkad.banjarkab.go.id>, (diakses pada 8 Desember 2020).



tahun 2017 disebabkan menurunnya belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2017. Pada tahun 2017 belanja operasi mengalami penurunan sebesar 1,052% dari belanja operasi tahun 2016. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,067% dari tahun 2016. Sedangkan untuk belanja tak terduga pada tahun 2017 mengalami penurunan 100% dari belanja tak terduga pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 hingga tahun 2019 belanja tak terduga tidak ada kas yang dikeluarkan.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Joko Pranomo yang dikutip dari buku karangan Halim 2007 ada beberapa tujuan dalam melakukan analisis rasio keuangan, diantaranya: a) menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, b) mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, c) mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya, d) kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam bentuk pendapatan daerah, e) melihat perubahan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Ada beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan hasil yang beragam. Menurut Melisano Yosias Melatunan dan Sherly Pinatik (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Sorong pada tahun 2014-2018 kurang baik, kinerja pendapatan dan kinerja belanja kurang efisien, efisiensi pengelolaan anggaran belanja kurang efisien, namun untuk efektivitas anggaran pendapatan sudah cukup efektif.<sup>16</sup> Novira Sartika (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kepulauan Meranti sudah

---

<sup>15</sup> Joko Purnomo, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)", *Among Makarti*, Vol.7, No.13, 2014. hlm.87.

<sup>16</sup> Melisano Yosias Melatunan dan Sherly Pinatik, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong", *Jurnal EMBA* Vol. 7 No. 3, 2019, hlm. 4142.

cukup baik namun dalam hal kemandirian dalam membiayai urusan pemerintahan kurang optimal.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah kota blora, dengan data laporan keuangan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini akan berfokus pada kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, rasio efisiensi pendapatan daerah..

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Adakah perbedaan kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?
2. Adakah perbedaan kinerja keuangan ditinjau dari rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ?
3. Adakah perbedaan kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi pendapatan asli daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

---

<sup>17</sup> Novi Sartika, “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti”, *Jurnal Inovasi Bisnis*, 2019, hlm. 153.

2. Untuk menguji secara empiris kinerja keuangan ditinjau dari rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
3. Untuk menguji secara empiris kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi pendapatan asli daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

#### Manfaat Penelitian:

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan bagi peneliti terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintahan di kabupaten Blora.

2. Bagi pemangku kepentingan

Sebagai penilaian dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sekaligus motivasi pemerintah untuk melakukan kinerja terhadap tanggungjawab yang telah dibebankan.

3. Bagi akademik

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

##### Bab I: Pendahuluan

Pada bab I bagian pendahuluan ini menjelaskan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### Bab II: Landasan Teori

Pada bab II landasan teori, penulis menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ditinjau dari rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga berisi mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

#### Bab III: Metode Penelitian

Pada bab III membahas terkait metode penelitian, diantaranya berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

#### Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV berisi gambaran umum obyek penelitian, serta menjelaskan hasil yang diperoleh dari hasil penganalisan, dan interpretasi dari hasil penelitian serta data yang didapatkan.

#### Bab V: Penutup

Pada bab V, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Regulasi

Regulasi yaitu aturan hukum atau suatu norma adat istiadat yang harus dipatuhi di wilayah tertentu. Menurut KBBI, regulasi yaitu mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Para ahli teori menyatakan regulasi muncul dari suatu reaksi permasalahan krisis yang tidak dapat diidentifikasi. Adanya berbagai krisis mendorong terbentuknya regulasi. Menurut Scott yang dikutip dari skripsi Faizah Dwi Safitri, terdapat dua teori regulasi, yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik berbasis akrual yaitu untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik. Kebutuhan atas regulasi akuntansi sektor publik terus berkembang secara dinamis seiring berkembangnya kebutuhan pemerintah. Berkembangnya kebutuhan pemerintah ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan. Peraturan Perundangan terus bergerak dinamis menyesuaikan kebutuhan. Peraturan tersebut diantaranya, PP No. 24 Tahun 2005 kemudian digantikan PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2016, dan diikuti peraturan di setiap daerah.<sup>18</sup>

##### 2. Teori Legitimasi

Legitimasi yaitu kualitas [hukum](#) yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Legitimasi juga dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui [kewenangan](#), [keputusan](#) atau [kebijakan](#) yang diambil oleh seorang pemimpin. Semangat reformasi dibidang keuangan mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk ikut serta menerima, mengawasi kinerja pemerintah. Perubahan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, transparansi, mandiri, dan akuntabel dalam mengelola keuangan.

##### 3. Dasar Pencatatan Akuntansi

Dalam setiap kelangsungan hidup suatu organisasi pasti tidak lepas dengan yang namanya proses akuntansi. Dalam proses akuntansi tersebut, suatu organisasi akan melakukan pencatatan sehingga segala hal yang berkaitan dengan keuangan dapat

---

<sup>18</sup> Dwi, Fitriyani Faizah. "Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sap Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun Anggaran 2014 Dan 2015)". *Skripsi*. 2017. hlm.8.

didata dan tercatat dengan baik.<sup>19</sup> Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan. Perintah tersebut terdapat dalam potongan Firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282:<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ .....

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....(Al-Baqarah:282).

Dalam tafsir Jalalayn yang menjelaskan kandungan dari Q.S Al-Baqarah Ayat 282 bahwa setiap orang yang beriman yang melakukan muamalah baik jual beli, sewa menyewa, utang piutang, ataupun yang lainnya hendaklah dilakukan pencatatan sebagai bentuk pengukuhan dan menghindari pertikaian jika ada diantara salah satu pihak yang lupa atas transaksi tersebut.

Dalam tafsir al-misbah juga menjelaskan kandungan yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 yaitu setiap orang yang beriman, apabila melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas. Dan setiap transaksi yang terjadi hendaknya dicatat untuk melindungi hak setiap orang dan menghindari perselisihan.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan apa yang terkandung dalam Q.S Al-baqarah Ayat 282 yaitu untuk mendorong umat islam agar senantiasa mencatat setiap transaksi yang telah terjadi. Tujuan adanya pencatatan untuk mengontrol setiap transaksi yang telah dilakukan. Pencatatan dan pembukuan merupakan langkah awal dari proses akuntansi.

---

<sup>19</sup> Dina Amalia, "[Https:// www.jurnal.id](https://www.jurnal.id)", (diakses pada 31 Maret 2020).

<sup>20</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>, (diakses pada 31 Maret 2020)

<sup>21</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282> (diakses pada 31 Maret 2020)

Secara umum basis pencatatan akuntansi ada 2 (dua) yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi pada saat menerima atau mengeluarkan kas ataupun setara kas. Basis kas diterapkan dalam 2 (dua) hal, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban atau biaya. Dalam sistem basis kas pendapatan baru bisa diakui jika ada kas yang diterima. Sedangkan untuk pengakuan beban dan biaya bisa diakui jika ada kas yang dikeluarkan sedangkan basis akrual yaitu pencatatan dilakukan saat terjadinya peristiwa atau kegiatan ekonomi meskipun tidak ada kas yang diterima maupun kas yang dikeluarkan tanpa memperhatikan kas ataupun setara kas. Dalam setiap kegiatan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Begitupun dalam proses pencatatan keuangan yang menggunakan basis kas dan basis akrual. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan basis yang digunakan yaitu<sup>22</sup>:

#### 1. Kelebihan dan kekurangan basis kas

Dalam proses pencatatan akuntansi yang menggunakan basis kas mempunyai kelebihan yaitu:

- 1) Sebuah pendapatan langsung bisa diakui saat kas diterima.
- 2) Tidak memiliki resiko terhadap pendapatan tidak tertagih.
- 3) Selain kelebihan dalam penggunaan basis kas dalam proses pencatatan, basis kas juga mempunyai kekurangan, diantaranya:
- 4) Informasi yang diberikan tidak akurat, ini dikarenakan hanya menunjukkan posisi keuangan pada saat pencatatan saja.

#### 2. Kelebihan dan kekurangan basis akrual

Selain basis kas, basis akrual juga mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Diantara kelebihan penerapan basis akrual yaitu:

- 1) Menunjukkan gambaran pendapatan.
- 2) Penerimaan dan pengeluaran langsung diakui.
- 3) Lebih mudah mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas.

---

<sup>22</sup> Ayu, <https://ukirama.com>, ” (diakses pada 31 Maret 2020).

- 4) Informasi yang diberikan lebih akurat, karena setiap terjadinya transaksi dilakukan pencatatan.

Selain kelebihan dalam penggunaan basis akrual dalam proses pencatatan, basis akrual juga mempunyai kekurangan, diantaranya:

- 1) Kas hasil transaksi tidak bisa ditentukan kapan bisa diterima.
- 2) Memiliki resiko pendapatan yang tidak tertagih.
- 3) Memiliki resiko penurunan ekuitas.

#### **4. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tuntutan publik atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola dana publik membutuhkan perlakuan yang khusus. Pasalnya kinerja pemerintah dalam menajalankan kewajibannya dapat dinilai dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah itu sendiri. Untuk mengelola dan menyajikan laporan keuangan tersebut pemerintah memberikan aturan khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Definisi akuntansi pemerintah tidak jauh dengan pemahaman akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintah yang secara konotasi tidak jauh dari kata lembaga politik yang lebih menonjol dari aspek ekonomipun tidak bisa dikesampingkan. Pemerintahan yang baik pemerintah yang mempunyai integritas diantaranya akuntabilitas, transparansi, daya tangkap, efektivitas, dan efisiensi.<sup>23</sup> Jadi akuntansi pemerintah yaitu akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkan.

Untuk menjadi sebuah pemerintahan yang akuntabel dan transparan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyusun laporan keuangan yang akan disajikan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan. Dalam sejarah perjalanannya untuk menuju pemerintahan yang akuntabel dan transparan pemerintah telah menerapkan dasar-dasar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) didasarkan pada PP No. 71

---

<sup>23</sup> Rahman El Junusi, "COSO-Based Internal Control: Efforts towards Good University Governance", *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2020, hlm. 35.



Tahun 2010. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Menurut Wijaya yang dikutip dari Farida Khairani Lubis, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan.<sup>24</sup>

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.<sup>25</sup> Tujuan dari pelaporan keuangan akuntansi pemerintah adalah:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penganggaran sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan kecukupan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

---

<sup>24</sup> Farida Khairani Lubis, “ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatra Utara”, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) , Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 18.

<sup>25</sup> Haq Abdul Ahmad,” <https://www.wikiapbn.org>”, (diakses pada 1 April 2020).

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan selama periode yang pelaporan.

Proses pencatatan laporan keuangan yang sudah diatur dalam PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menggunakan 2 (dua ) basis, yaitu:

- 1) SAP berbasis kas menuju akrual

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis kas menuju akrual dilakukan oleh entitas yang belum siap melakukan transisi secara penuh dari basis kas menjadi basis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibagi menjadi 2 (dua) entitas, yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu entitas yang menyajikan laporan keuangan satuan kerja untuk disampaikan ke entitas pelaporan menyusun neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan entitas pelaporan yaitu entitas yang menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah secara konsolidasi dan membuat tambahan laporan arus kas.

- 2) SAP berbasis akrual

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui transaksi pada saat terjadi bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. SAP berbasis akrual mengakui pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan

ekuitas, laporan saldo anggaran lebih/kurang, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

**5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah.**

Dalam Permendagri No.64 tahun 2013 setiap pemerintah daerah propinsi/kabupaten kota perlu menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual. Penyusunan kebijakan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pedoman penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, panduan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar dan format penyajian laporan realisasi anggaran (LRA). Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan prinsip, dasar dan aturan yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dan setiap kepala daerah berwenang menyusun kebijakan akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berdasarkan SAP No.71 tahun 2010 yang merujuk pada Permendagri No.64 tahun 2013.

**6. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora.**

Dalam Perbup No.53 tahun 2015 yang mengacu pada Permendagri No.64 tahun 2013, yang menyebutkan bahwa setiap kepala daerah mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Maka kepala daerah Blora atau bupati Blora menerbitkan Perbup No.53 tahun 2015. Diterbitkannya peraturan bupati ini sebagai SKPD dan SKPKD dalam melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual di SKPD dan SKPKD. Yang dimaksud SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaku perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran/ menggunakan barang. SKPKD yaitu satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini wajib diterapkan disemua entitas pemerintah dikabupaten Blora. Pemberlakukan penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) berbasis akrual sejak ditetapkannya Perbup No.53 tahun 2015 yaitu pada tanggal 7 Desember 2015. Sebagai bentuk ketataan kepada pemimpin semua entitas pemerintah dikabupaten Blora yang meliputi SKPD, SKPKD, PPKD, PPK-SKPD, dan lain-lain menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Perintah untuk mentaati pemimpin juga terdapat dalam potonga Firman Allah Q.S An-Nisa Ayat 59:<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu,.....

Dalam kandungan ayat ini kita (orang beriman) dianjurkan untuk mentaati Allah, Rasul, dan para pemimpin. Sesuai yang terkandung dalam tafsir Jalalayn yang menjelaskan setiap orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin. Para pemimpin yang dimaksud disini pemimpin pada saat ini.

Sedangkan dalam tafsir al-misbah menjelaskan kandungan ayat ini yaitu perintah untuk setiap orang yang beriman agar senantiasa taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin umat Islam pada saat ini. Pemimpin yang mengurus urusan manusia dengan menegakkan kebenaran, keadilan, dan melaksanakan syariat.

Jadi,kesimpulan setiap orang yang beriman harus taat kepada pemimpinnya. Apapun aturan yang dibuat pemimpin harus dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam hadis H.R. Bukhari No. 7257 Rasulullah Bersabda “ Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah), Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat). Dalam hadis ini dapat ditarik makna mentaati pemimpin hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan larangan Allah.<sup>27</sup> Apapun kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus dipatuhi oleh para pengikut atau rakyatnya. Selain mematuhi perintah pimpinan itu suatu kewajiban, seorang pemimpin juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan bawahan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> (Diakses pada 22 Desember 2020)

<sup>27</sup> Oded M. Danial, “<https://humas.bandung.go.id>”, (Diakses pada 22 Desember 2020).

<sup>28</sup> Nurudin, "The Effect of Work Motivation on Performance with Job Satisfaction as an Intervening Variable in the Faculty of Islamic Economics and Business UIN Walisongo Semarang", *BMAJ: Business Management Analysis Journal*, 2020, hlm. 34.

Pemimpin perlu memberikan motivasi yang baik kepada bawahannya. Jika di dalam lingkup negara maka pemimpinnya presiden, dan semua aturan atau kebijakan yang dibuat oleh presiden harus ditaati oleh semua yang tinggal di dalam negara. Begitu pula dalam pemerintah daerah, bupati sebagai pemimpin dan yang tinggal dalam lingkup pemerintah daerah wajib ditaati dan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh bupati harus dilaksanakan. Setiap pemimpin yang membuat kebijakan pasti dengan maksud untuk memberikan suatu kemaslahatan terhadap pengikutnya/rakyatnya. Begitupun perbup No.53 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Blora mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan yang terjadi di SKPD dan SKPKD sudah dicatat dengan benar, dan
2. Untuk menjamin bahwa semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berasal dari suatu proses (siklus akuntansi) sehingga bisa ditelusuri kebenarannya.

## **7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Secara etimologi kinerja berasal dari kata *performance* yang berarti prestasi kerja. Menurut Mangkunegara yang dikutip dari penelitian Ainul Ridha “kinerja merupakan prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya diraih oleh seseorang yaitu hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang diraih oleh pegawai karena telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan.<sup>29</sup> Kinerja dapat diukur melalui capaian kerja yang telah diwujudkan oleh suatu organisasi daerah dalam satuan kerjanya. Tolak ukur kinerja dapat diterapkan dalam bentuk standar pelayanan yang telah ditentukan oleh setiap masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang terkait. Pengukuran kinerja juga dapat berfungsi sebagai alat pengawas, dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilakukan. Dengan pengukuran kinerja, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik.

---

<sup>29</sup> Ainul Ridha, “Pengaruh Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Aceh”, *Jurnal Simen*, 2018, hlm. 37-49.

Kinerja keuangan menurut kamus akuntansi manajemen kinerja keuangan merupakan suatu aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Sedangkan kinerja keuangan menurut Sucipto yang dikutip dari Supina Sino, Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau Undang-Undang selama satu periode anggaran.<sup>30</sup> Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu suatu aktivitas keuangan yang diukur mulai dari penerimaan dan belanja di entitas pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan diantaranya:

1. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Suatu daerah yang sudah mandiri diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

2. Rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Rasio efektivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mewujudkan realisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>31</sup> Keefektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah sebagai tolak ukur untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Untuk

---

<sup>30</sup> Supino Sino,dkk, ” Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat”, *Artikel Skripsi*, 2015, hlm.1-7.

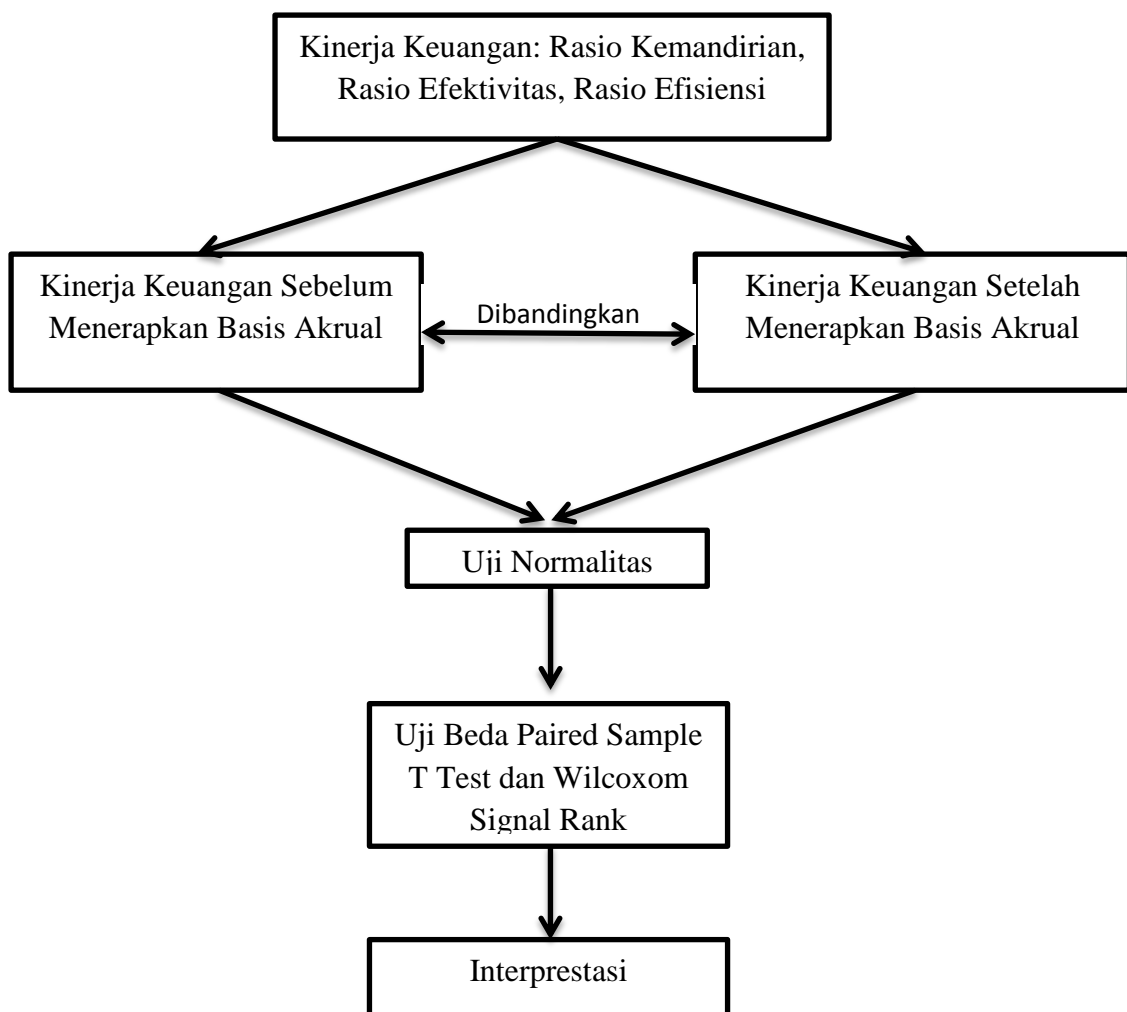
<sup>31</sup> Melisano Yosias Melatunan dan Sherly Pinatik, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong ”, *Jurnal EMBA*, 2019, hlm.413

menghitung rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD.

3. Rasio efisiensi pendapatan daerah.

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur suatu kegiatan yang telah dilakukan pemerintah terlaksana dengan efisien atau tidak. Efisien yaitu biaya yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan sebanding atau tidak dengan manfaat kegiatan yang dihasilkan. Atau biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD sebanding atau tidak dengan PAD yang diterima. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan mengukur biaya perolehan PAD dibagi realisasi penerimaan PAD dikali 100%. Semakin kecil angka rasio berarti semakin efisien kinerja pemerintah.

**B. Kerangka Teori**



### C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dan berhubungan dengan judul yang peneliti ambil, antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Surakarta” penelitian ini dilakukan oleh Joko Pranomo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut maka dapat disimpulkan a) kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 pada aspek kemandirian dan aspek keserasian masih kurang maksimal, b) Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih rendah, c) Dalam penggunaan dananya Pemkot Surakarta masih belum berimbang, d) kinerja keuangan Pemkot Surakarta pada tahun tersebut sudah baik pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, dan kemampuan membayar pinjaman.<sup>32</sup>
2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Penerapan Basis Akruwal Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Shanti.<sup>33</sup> Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada dampak penyajian keuangan setelah menerapkan basis akruwal, sedangkan peneliti berfokus pada kinerja keuangan.
3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti” penelitian ini

---

<sup>32</sup> Joko Purnomo, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta”, *Among Makarti*, Vol.7, No.13, 2014, hlm. 110.

<sup>33</sup> Shanti Yunita Kurnia, “Analisis Penerapan Basis Akruwal Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur)”, *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesi*, 2018, hlm. 69.



dilakukan oleh Novira Sartika (2019). Novira dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kepulauan Meranti sudah cukup baik namun dalam hal kemandirian dalam membiayai urusan pemerintahan kurang optimal. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah setelah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual namun dengan obyek penelitian yang berbeda.<sup>34</sup>

4. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong” penelitian ini dilakukan oleh Melsiano Yosias Melatunan dan Sherly Pinatik (2019). Dalam penelitiannya Melsiano dan Sherly menyatakan bahwa kinerja keuangan pada kota Sorong masih kurang baik, pada pengeluaran belanja dan pendapatan masih kurang efisien, selain itu efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja dalam rasio efisiensi juga kurang efisien, namun dalam rasio efektivitas pendapatan dan belanja sudah cukup efektif.<sup>35</sup>
5. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu” penelitian ini dilakukan oleh Ifrita Indah sari dan Imawati Yousida (2019). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tingkat kemandirian Tanah Bumbu masih sangat rendah, dalam mengurus kebutuhan belanja masih bergantung pada pemerintah pusat. Tingkat efisiensi sudah cukup baik, dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah sudah cukup efektif.<sup>36</sup>
6. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Kemandirian dan Kemampuan Kinerja Keuangan kabupaten Gowa” penelitian ini dilakukan oleh Nurul Istiqamah Akhmad, dkk (2019). Penelitian ini menggunakan Uji Beda Dua Sampel dengan hasil penelitian bahwa tingkat PAD tidak berbeda signifikan sedangkan dana transfer berbeda secara signifikan, tingkat kemandirian Kabupaten Gowa masih

---

<sup>34</sup> Novira Sartika, ”Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti “, *Jurnal Inovasi Bisnis* 7,2019, hlm. 153.

<sup>35</sup> Melisano Yosias Melatunan dan Sherly Pinatik, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong ”, *Jurnal EMBA*, 2019, hlm.4143.

<sup>36</sup> Ifrita Indah Sari dan Imawati Yousida, “Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 2019, hlm. 140.

rendah, tingkat efektivitasnya juga masih mengalami fluktuatif. Penelitian ini akan menggunakan alat uji yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Uji Dua Sampel Berpasangan.<sup>37</sup>

7. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Propinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah”, penelitian ini dilakukan oleh Zesmi Kusmila, dkk (2018), penelitian ini menggunakan alat uji *Paired Sample T-Test* dengan hasil penelitian bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dalam rasio kemandirian, desentralisasi, efektivitas, dan efisiensi setelah adanya pemekaran wilayah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tingkat kinerja keuangan ini diukur setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sedangkan penelitian sebelumnya mengukur kinerja keuangan sebelum dan setelah adanya pemekaran wilayah.<sup>38</sup>

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang kebenarannya harus dibuktikan dan diverifikasi dengan penelitian empiris:

1. Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio efektivitas antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio efisiensi antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

---

<sup>37</sup> Istiqamah, Akhmad Nurul , Dkk, "Analisis Kemandirian Dan Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Artikel*, 2019 hlm. 1-9.

<sup>38</sup> Kusmila, Zesmi, dkk, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Jambi Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah", *Jurnal Artikel*, 2018, hlm.27–39.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan beberapa sampel data yang disebut penelitian komparatif. Kemudian dianalisis menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, selanjutnya diinterpretasikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait perbedaan kondisi kinerja keuangan lima tahun sebelum dan lima tahun setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang datanya berbentuk angka dan dikumpulkan dari laporan keuangan pemerintah kabupaten Blora, kemudian dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan yang jelas.

#### **B. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan pemerintah kabupaten Blora pada tahun 2011-2020. Data tersebut merupakan data sekunder karena diambil dari laporan keuangan yang sudah disajikan oleh pemerintah kabupaten Blora.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan obyek penelitian untuk dipelajari guna menghasilkan kesimpulan yang jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Blora yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD).

##### **2. Sampel**

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan pemerintah kabupaten Blora sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Periode sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah tahun 2011 hingga tahun 2015 sedangkan periode setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis

akrual adalah tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Periode Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Blora**

<b>Periode</b>	<b>Tahun Sebelum Basis Akrual</b>	<b>Tahun Setelah Basis Akrual</b>
P1	Tahun 2011	Tahun 2016
P2	Tahun 2012	Tahun 2017
P3	Tahun 2013	Tahun 2018
P4	Tahun 2014	Tahun 2019
P5	Tahun 2015	Tahun 2020

**D. Variabel penelitian dan Pengukuran**

Variabel yang dipake dalam penelitian ini yaitu:

1. Rasio Kemandirian dalam Merealisasikan Pendapatan Asli Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan keuangan pemerintah dalam membiayai urusan pemerintahannya sendiri baik dari segi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut Abdul Halim yang dikutip dari jurnal Joko Purnomo “kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang ditunjukkan untuk menilai besar kecilnya pendapatan yang berasal dari daerah atau biasa disebut Pendapatan Asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sumber lainnya, misalnya: bantuan langsung dari pemerintah baik pemerintah daerah (Provinsi) ataupun pemerintah pusat, dan ataupun pendapatan yang berasal dari pinjaman.<sup>39</sup>

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat pasrtisipasi masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan

---

<sup>39</sup> Joko Purnomo, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta” *Among Makarti*, Vol.7, No.13, 2014. Hlm. 104.

semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pembayaran kewajiban ke pemerintah baik dari segi pajak, dan retribusi daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

**Rasio Kemandirian**

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Yang Sah}}$$

Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah menggunakan landasan Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Kriteria Rasio Kemandirian dalam Merealisasikan Pendapatan Asli Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian %</b>
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

2. Rasio Efektivitas dalam Merealisasikan Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Untuk menghitung nilai efektivitas pemerintah kabupaten Blora dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio efektivitas keuangan pemerintah dapat menggunakan kriteria seperti berikut ini:

**Tabel 3.3**

**Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Presentase Efektivitas</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
X>100%	Sangat Efektif
X=100%	Efektif
X<100%	Tidak Efektif

**3. Efisiensi dalam Merealisasikan Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efisiensi yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung berapa banyak pendapatan yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah dikatakan efisien jika dalam pemungutan pendapatan rasio perhitungannya kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% (persen). Semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja keuangan pemerintah semakin bagus. Perhitungan rasio efisiensi harus dilakukan secara cermat karena rasio efisien digunakan untuk menentukan kinerja keuangan apakah efisien atau belum. Karena meskipun pemerintah sudah berhasil merealisasikan target penerimaan yang dianggarkan tetapi jika belanja yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima, maka kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah dikatakan tidak efisien. Untuk mengukur nilai efisiensi keungan daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio efisiensi dapat menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Presentase Efisiensi</b>	<b>Kriteria Efisiensi</b>
$X > 100\%$	Tidak Efisien
$= 100\%$	Efisien Berimbang
$X < 100\%$	Efisien

**E. Teknik Analisis Data**

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogrof smirnof. Jika data yang digunakan penelitian berdistribusi normal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode parametrik. Namun, jika data yang digunakan tidak berdistribusi normal, maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data mana yang akan digunakan dapat menggunakan:

- a. Jika probabilitas (*Asymp.Sig*)  $< 0,05$  maka tidakberdistribusi normal
- b. Jika probabilitas (*Asymp.Sig*)  $> 0,05$  maka tidakberdistribusi normal

2. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji normalitas data, maka akan didapatkan hasil untuk menentukan alat uji apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Jika data berdistribusi normal maka menggunakan alat uji parametrik *Paired Sample T-Test*. Apabila data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji nonparametrik *Wilcoxon Signed Rank Test*. *Paired Sample T-Test* dan *Wilcoxon Signed Rank* merupakan model uji beda yang berfungsi untuk menganalisis model penelitian sebelum dan setelah, selain itu juga untuk mengevaluasi perlakuan tertentu terhadap satu sampel yang sama dengan dua periode pengamatan yang berbeda.

- a. *Paired Sample T-Test*

*Paired Sample T-Test* merupakan suatu metode pengujian yang dilakukan terhadap perbedaan dua sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan merupakan sampel yang memiliki subjek yang sama namun dengan dua perlakuan yang berbeda. *Paired Sample T-Test* digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal. *Paired Sample T-Test* merupakan suatu metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui keefektifan perlakuan, hal tersebut ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata setelah diberikan perlakuan.

b. *Wilcoxon Signed Rank Test*

*Wilcoxon Signed Rank Test* adalah uji non parametrik untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. *Wilcoxon Signed Rank Test* digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Pengambilan Keputusan pada uji *paired sampel t-test* maupun *wilcoxon signed rank test* adalah:

- 1) Jika probabilitas (Asymp.Sig) $<0,05$  :  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- 2) Jika probabilitas (Asymp.Sig) $>0,05$  :  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Prosedur untuk uji *paired sampel t-test* atau *Wilcoxon Signed Rank Test*, sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

$H_0$ = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada pemerintahan kabupaten Blora sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

$H_a$ = Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada pemerintahan kabupaten Blora sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

- b) Menentukan *Level of significant* sebesar 5% atau 0,05.
- c) Menentukan kriteria pengujian:

$H_0$  ditolak jika nilai probabilitas  $< 0,05$  berarti terdapat perbedaan yang signifikan

$H_0$  diterima jika nilai probabilitas  $> 0,05$  berarti terdapat perbedaan yang signifikan



d) Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Kabupaten Blora secara administrasi berada di Jawa Tengah bagian ujung timur berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Blora mempunyai luas wilayah 1.820,58797 km<sup>2</sup> atau (5,59 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah) dengan bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Jarak terjauh kabupaten Blora dari bagian barat hingga bagian timur sejauh 87 km, dan jarak terjauh antara bagian selatan dan bagian utara sejauh 58 km. Secara geografis Kabupaten Blora terletak diantara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Ibu kota kabupaten Blora terletak di Blora. Kabupaten Blora memiliki 16 Kecamatan, 271 wilayah Desa, 24 wilayah Kelurahan yang mencakup 1.125 Dusun, 1.206 Rukun Warga, dan 5.462 Rukun Tetangga.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintahan Blora mulai diterapkan sejak tahun 2015. Sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 bahwa semua pemerintah daerah secara penuh harus menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Kemudian peraturan tersebut disusul dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Blora dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Bupati dan mulai diterapkan pada tanggal 7 Desember 2015.

#### **B. Deskripsi Data Penelitian**

Pemerintah kabupaten Blora menerapkan basis akrual pada pencatatan setiap transaksi laporan keuangan dimulai sejak tahun 2016. Fokus penelitian ini pada kinerja keuangan pemerintah Blora 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Gambaran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora sebelum dan setelah penerapan basis akrual, berdasarkan laporan keuangan tahunan adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Sebelum Menerapkan Basis Akrua

**Tabel 4.1**

**Kinerja Keuangan Sebelum Penerapan Basis Akrua**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Efisiensi</b>
<b>1</b>	2011	7,12%	114,76%	91,87%
<b>2</b>	2012	7,84%	133,60%	99,81%
<b>3</b>	2013	7,95%	122,04%	101,99%
<b>4</b>	2014	10,55%	120,84%	96,82%
<b>5</b>	2015	10,48%	113,85%	101,09%

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami fluktuatif. Berdasarkan tabel diatas tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Blora tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Blora terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Blora mengalami penurunan sebesar 0,07% dari tahun 2014 atau menjadi 10,48%.

Tingkat rasio efektivitas pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami fluktuatif. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2015 tingkat rasio efektivitas pemerintah kabupaten Blora sudah sangat Efektif. Meskipun ada penurunan tingkat rasio efektivitas pada tahun 2013 hingga tahun 2015 namun tingkat rasio efektivitasnya masih sangat efektif.

Tingkat rasio efisiensi pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 tingkat rasio efisiensi pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan tingkat rasio efisiensi pada tahun 2011 dan 2012 sudah cukup efisien, namun pada tahun 2013 tingkat efisiensi pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat tidak efisien. Pada tahun 2014 tingkat efisiensi pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi pemerintah kabupaten

Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 4,27% atau sebesar 101,09%.

Tingkat rasio ekonomi pemerintah kabupaten Blora sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga tahun 2

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**  
**Kinerja Keuangan Sebelum Penerapan Basis Akrual**

		Kemandirian	Efektivitas	Efisiensi
N		5	5	5
Range		3,43	19,75	10,12
Min		7,12	113,85	91,87
Max		10,55	133,60	101,99
Sum		43,94	605,09	491,58
Mean	Statistic	8,7880	121,0180	98,3160
	Std. Error	,71940	3,53501	1,83323
Std. Deviation		1,60862	7,90452	4,09922
Variance		2,588	62,481	16,804

- a. Rasio Kemandirian sebelum penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,55%, sedangkan rasio kemandirian terendah pada tahun 2011 sebesar 7,12%. Rata-rata rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrual sebesar 8,7880%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan kota Blora tergolong sangat rendah sekali karena berada pada interval 0%-25%.
- b. Rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 133,85%, sedangkan Rasio efektivitas terendah pada tahun 2015 sebesar 113,85%. Rata-rata rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual sebesar 121,0180%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan kota Blora tergolong sangat efektif sekali karena memiliki rasio diatas 100%.

- c. Rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 101,99%, sedangkan Rasio efektivitas terendah pada tahun 2015 sebesar 91,87%. Rata-rata rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual sebesar 98,3160%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan kota Blora tergolong sangat efisien sekali karena memiliki rasio dibawah 100%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Setelah Menerapkan Basis Akrual

**Tabel 4.3**

**Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Basis Akrual**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Efisiensi</b>
<b>1</b>	2016	10,15%	97,76%	104,7%
<b>2</b>	2017	16,15%	104,38%	98,1%
<b>3</b>	2018	10,60%	102%	99,5%
<b>4</b>	2019	12,37%	113,21%	98%
<b>5</b>	2020	16,40%	108,06%	99%

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami fluktuatif. Berdasarkan tabel diatas tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Blora tahun 2016-2019 mengalami Fluktuatif. Pada tahun 2016-2017 tingkat kemandirian keuangan pemerintah Blora mengalami peningkatan sebesar 6%. Namun pada tahun 2018 tingkat kemandirian keuangan pemerintah Blora mengalami penurunan sebesar 4,55%. Penurunan tersebut terjadi karena ada penurunan pada pos penerimaan pendapatan asli. Kemudian pada tahun 2019 tingkat kemandirian keuangan pemerintah Blora mengalami kenaikan kembali sebesar 1,77%. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Blora tergolong rendah sekali karena berada dalam kurval 0-25%. Rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan diatas menunjukkan bahwa dalam membiayai urusan pemerintahannya kabupaten Blora masih bergantung pada dana Transfer dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pada rasio efektivitas diatas, tingkat efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten Blora tahun 2016 tidak efektif karena nilai rasio efektivitas dibawah 100% atau sebesar 97,76%. Hal tersebut terjadi karena tingkat realisasi pendapatan asli daerah lebih kecil

dibanding dengan jumlah penganggaran pendapatan asli daerah tahun 2016. Namun pada tahun 2017-2019 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten Blora sangat efektif karena tingkat realisasi pendapatan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang dianggarkan atau nilai rasio efektivitasnya diatas 100%. Nilai rasio efektivitas pada tahun 2017-2019 sebesar 104,38%,102%, dan 113,21%. Meskipun pada tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan jika dibanding tahun 2017 namun tingkat rasionya masih tergolong sangat efektif karena masih diatas angka 100%.

Rasio efisiensi kabupaten Blora pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 rasio efisiensi kabupaten Blora tergolong tidak efisien karena nilainya melebihi 100%. Jumlah belanja pada tahun 2016 melebihi jumlah penerimaan pada tahun 2016, sehingga rasio efisiensinya tergolong tidak efisien. Pada tahun 2017, 2018, dan tahun 2019 rasio efisiensi keuangan kabupaten Blora sudah efisien karena nilai rasionya dibawah 100% yaitu sebesar 98,1% pada tahun 2017, 99,5% pada tahun 2018, dan 98% pada tahun 2019. Meskipun pada tahun 2018 nilai rasio efisiensinya naik 1,4% kearah negatif namun tingkat rasio efisiensi pada tahun 2018 masih tergolong efisien. Kemudian pada tahun 2019 tingkat efisiensi kabupaten Blora mengalami kenaikan ke arah positif sebesar 1,5% dari tahun 2018.

**Tabel 4.4**

**Statistik Deskriptif**

**Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Basis Akrua**

		Kemandirian	Efektivitas	Efisiensi
N		5	5	5
Range		6,25	15,45	6,70
Min		10,15	97,76	98,00
Max		16,40	113,21	104,70
Sum		65,67	525,41	499,30
Mean	Statistic	13,1340	105,0820	99,8600
	Std. Error	1,33552	2,63188	1,24201
Std. Deviation		2,98631	5,88507	2,77723
Variance		8,918	34,634	7,713

- a. Rasio Kemandirian setelah penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 16,40%, sedangkan rasio kemandirian terendah pada tahun 2016 sebesar 10,15%. Rata-rata rasio kemandirian setelah penerapan basis akrual sebesar 13,1340%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat rasio kemandirian setelah penerapan basis akrual pada pemerintahan kota Blora tergolong sangat rendah sekali karena berada pada interval 0%-25%.
- b. Rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 113,21%, sedangkan Rasio efektivitas terendah pada tahun 2016 sebesar 97,76% Rata-rata rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual sebesar 105,0820%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan kota Blora tergolong sangat efektif sekali karena memiliki rasio diatas 100%.
- c. Rasio efisiensi setelah penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 104,70%, sedangkan Rasio efektivitas terendah pada tahun 2019 sebesar 98%. Rata-rata rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual sebesar 98,8600%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan kota Blora tergolong sangat efisien sekali karena memiliki rasio dibawah 100%.

### C. Uji Data

#### a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *kolmogorof smirnof* dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diteliti berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi  $>0,05$  maka data berdistribusi normal sehingga uji beda yang digunakan adalah uji parametrik *Paired Sample T-Test*. Jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka data tidak berdistribusi normal sehingga uji beda yang digunakan adalah uji nonparametrik *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil uji normalitas ini untuk menentukan uji beda yang akan digunakan selanjutnya.

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas Data Sebelum Penerapan Basis Akruar**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi
N	5	5	5
Normal Paramete mean	8.7880	121.0180	98.3160
Std. Deviation	1.60862	7.90452	4.09922
Most Extreme Differences Absolute	.299	.249	.242
Positive	.299	.249	.185
Negative	-.254	-.182	-.242
Kolmogorov- Smirnov Z	.668	.556	.542
Asymp. Sig. (2- tailed)	.763	.917	.931

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorof-smirnof* pada tabel 4.5 untuk kinerja keuangan sebelum penerapan basis akruar, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada rasio kemandirian adalah sebesar 0,763. Pada rasio efektivitas adalah sebesar 0,917. Dan pada rasio efisiensi sebesar 0,931. Karena signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebelum penerapan basis akruar berdistribusi normal, sehingga alat analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji *Paired Sample T-Test*.

**Tabel 4.6**  
**Uji Normalitas Data Setelah Penerapan Basis Akruar**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi
N	5	5	5
Normal Paramete mean	13.1340	105.0820	99.8600
Std. Deviation	2.98631	5.88507	2.77723
Most Extreme Differences Absolute	.244	.147	.352



Positive	.202	.147	.352
Negative	-.244	-.116	-.252
Kolmogorov-Smirnov Z	.545	.330	.786
Asymp. Sig. (2-tailed)	.928	1.000	.567

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorof-smirnof* pada tabel 4.5 untuk kinerja keuangan setelah penerapan basis akrual, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada rasio kemandirian adalah sebesar 0,928. Pada rasio efektivitas adalah sebesar 1,000. Dan pada rasio efisiensi sebesar 0,567. Karena signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrual berdistribusi normal, sehingga alat analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji *Paired Sample T-Test*.

b. Uji Beda

Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah uji beda *Paired Sample T-Test*. Terdapat tiga variabel yang akan diuji dalam penelitian ini. Variabel itu meliputi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

1) Rasio Kemandirian

**Tabel 4.7**

***Paired Sample T-Test***

**Rasio Kemandirian Sebelum dan Setelah Penerapan Basis Akrua**

**Paired Samples Statistics**

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum akrua- setelah akrua	4,34600	2,70091	1,20788	7,69963	,99237	-3,598	4	,023

Dasar pengambilan keputusan uji *Paired Sample T-Test* jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka  $H_0$  diterima, jika nilai Sig (2-tailed) > dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan uji *Paired Sample T-Test* dapat diketahui bahwa nilai Sig (2-tailed) pada variabel rasio kemandirian adalah sebesar 0,023, karena nilai 0,023 < 0,05 maka  $H_1$  diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrua dan rasio kemandirian setelah penerapan basis akrua pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora.

Mean pada tabel diatas adalah selisih yang didapatkan dari nilai rata-rata rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrua dikurangi dengan rata-rata setelah penerapan basis akrua. Nilai rata-rata rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrua adalah 8,7880 sedangkan nilai rata-rata rasio kemandirian setelah penerapan basis akrua adalah 13,1340 oleh karena itu selisih dari nilai rata-rata rasio kemandirian sebelum dan setelah penerapan basis akrua adalah 4.34600.

2) RasioEfektivitas

**Tabel 4.8**  
***Paired Sample T-Test***  
**Rasio Efektivitas Sebelum dan Setelah Penerapan Basis Akrua**  
**Paired Samples Statistics**

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum akrua- setelah akrua	15,93600	9,57040	4,28001	4,05277	27,81923	3.723	4	,020

Dasar pengambilan keputusan uji *Paired Sample T-Test* jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka  $H_0$  diterima, jika nilai Sig (2-tailed) > dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan uji *Paired Sample T-Test* dapat diketahui bahwa nilai Sig (2-tailed) pada variabel rasio efektivitas adalah sebesar 0,020, karena nilai 0,020 < 0,05 maka  $H_1$  diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrua dan rasio efektivitas setelah penerapan basis akrua pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora.

Mean pada tabel diatas adalah selisih yang didapatkan dari nilai rata-rata rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrua dikurangi dengan rata-rata setelah penerapan basis akrua. Nilai rata-rata rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrua adalah 121,0180 sedangkan nilai rata-rata rasio efektivitas setelah penerapan basis akrua adalah 105,0820 oleh karena itu selisih dari nilai rata-rata rasio efektivitas sebelum dan setelah penerapan basis akrua adalah 15,93600.

### 3. Rasio Efisiensi

**Tabel 4.9**  
***Paired Sample T-Test***  
**Rasio Efektivitas Sebelum dan Setelah Penerapan Basis Akrua**  
**Paired Samples Statistics**

	Paired Differences					t	D f	Sig. (2- tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum akrua- setelah akrua	1,54400	6,47252	2,89460	-9,58069	,492696	-,533	4	0,622

Dasar pengambilan keputusan uji *Paired Sample T-Test* jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka  $H_0$  diterima, jika nilai Sig (2-tailed) > dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan uji *Paired Sample T-Test* dapat diketahui bahwa nilai Sig (2-tailed) pada variabel rasio efisiensi adalah sebesar 0,622, karena nilai 0,622 > 0,05 maka  $H_1$  ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrua dan rasio efisiensi setelah penerapan basis akrua pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora.

Mean pada tabel diatas adalah selisih yang didapatkan dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrua dikurangi dengan rata-rata setelah penerapan basis akrua. Nilai rata-rata rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrua adalah 98,3160 sedangkan nilai rata-rata rasio efisiensi setelah penerapan basis akrua adalah 99,8600 oleh karena itu selisih dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebelum dan setelah penerapan basis akrua adalah ,544001.

#### **D. Pembahasan**

1. Perbandingan Rasio Kemandirian Sebelum dan Setelah Penerapan SAP Berbasis Akrua

**Tabel 4.10**

**Tabel Perbandingan Rasio Kemandirian Sebelum dan Setelah Penerapan Basis Akrua**

Rasio	Rata-rata sebelum	Rata-rata setelah	Hasil Uji Beda
Kemandirian	8,7880	13,1340	Terdapat perbedaan yang signifikan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh hasil perhitungan uji *paired sample test* untuk perbandingan rasio kemandirian sebelum dan setelah penerapan basis akrua pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,023, karena nilai  $0,023 < 0,05$  maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrua dan rasio kemandirian setelah penerapan basis akrua pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora.

Diperoleh Nilai rata-rata (mean) rasio kemandirian sebelum penerapan basis akrua adalah 8,7880 sedangkan nilai rata-rata (mean) rasio kemandirian setelah penerapan basis akrua adalah 13,1340. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintah Blora setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua semakin baik karena tingkat rasionya semakin meningkat. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian keuangan semakin lebih baik.

Meskipun sudah mengalami kenaikan, tingkat rasio kemandirian kabupaten Blora masih berada pada interval 0-25%, dimana pada interval tersebut tingkat kemandirian masih dinyatakan sangat rendah sekali karena masih dibawah angka 25%. Rendahnya tingkat kemandirian kabupaten Blora menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Blora dalam menjalankan roda pemerintahan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Perbandingan Rasio efektivitas Sebelum dan Setelah Penerapan SAP Berbasis Akrua

**Tabel 4.11**

**Tabel Perbandingan Rasio Efektivitas Sebelum dan Setelah Penerapan Basis Akrua**

Rasio	Rata-rata sebelum	Rata-rata setelah	Hasil uji beda
Efektivitas	121,0180	105,0820	Terdapat perbedaan yang sangat signifikan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh hasil perhitungan uji *paired sample test* untuk perbandingan rasio efektivitas sebelum dan setelah penerapan basis akrual pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,020, karena nilai  $0,020 < 0,05$  maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual dan rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora.

Diperoleh Nilai rata-rata (mean) rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual adalah 121,0180 sedangkan nilai rata-rata (mean) rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual adalah 105,0820. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio efektivitas keuangan pemerintah Blora setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual semakin baik karena tingkat efektivitasnya semakin menurun. Semakin rendah nilai rasio efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas keuangan semakin lebih baik. Semakin rendahnya nilai rasio efektivitas maka menunjukkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah semakin bagus dan realisasi pendapatan lebih besar dibanding dengan target yang dianggarkan.

3. Perbandingan Rasio efisiensi Sebelum dan Setelah Penerapan SAP Berbasis Akrua

**Tabel 4.12**

**Tabel Perbandingan Rasio Efisiensi Sebelum dan Setelah Penerapan Basis Akrua**

Rasio	Rata-rata Sebelum	Rata-rata setelah	Hasil uji beda
Efisiensi	98,3160	99,8600	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh hasil perhitungan uji *paired sample test* untuk perbandingan rasio efisiensi sebelum dan setelah penerapan basis akrual

pada pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,622, karena nilai  $0,622 > 0,05$  maka  $H_1$  ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrual dan rasio efisiensi setelah penerapan basis akrual pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora..

Diperoleh Nilai rata-rata (mean) rasio efisiensi sebelum penerapan basis akrual adalah 98,3160 sedangkan nilai rata-rata (mean) rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual adalah 99,8600. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio efisiensi keuangan pemerintah Blora setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual kurang baik karena tingkat efektivitasnya semakin menurun. Semakin rendah nilai rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi keuangan tidak baik. Semakin rendahnya nilai rasio efisiensi maka menunjukkan pengorbanan yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan daerah lebih tinggi daripada penerimaan yang diperoleh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, maka dapat disimpulkan:

- 1) Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,023, karena nilai  $0,023 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian antara sebelum dan setelah penerapan basis akrual pada kinerja keuangan pemerintah di kabupaten Blora
- 2) Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,020, karena nilai  $0,020 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efektivitas antara sebelum dan setelah penerapan basis akrual pada kinerja keuangan pemerintah di kabupaten Blora.
- 3) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,622, karena nilai  $0,622 > 0,05$  maka  $H_1$  ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efisiensi antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada kinerja keuangan pemerintah di kabupaten Blora

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan dari penulis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Blora



Pemerintah kabupaten Blora sebaiknya mampu meningkatkan dan memaksimalkan potensi yang dapat menghasilkan kekayaan yang ada dikabupaten Blora sehingga mampu menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Potensi tersebut bisa berasal dari sektor pariwisata, kebudayaan, perdagangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Apabila potensi tersebut dapat dimaksimalkan maka pajak yang diterima juga mampu mendorong penerimaan pendapatan asli daerah ke arah positif.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis kinerja keuangan pemerintah secara lebih detail. Selain itu penelitian selanjutnya bisa menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak untuk mendapatkan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih menyeluruh.

## Daftar Pustaka

- Atmojo, Dwi Priyo. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Sebelum Dan Setelah Penerapan Accrual Based*. Jurnal Skripsi Akuntansi.
- Agriyanto, Ratno, dkk. 2017. *Model of Prediction of Behavioral Use of Accrual Basis Accounting Inforation on Local Goverments in Indonesia*. Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 12 No. 23.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Dwi, Fitriyani Faizah. 2017. “*Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sap Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun Anggaran 2014 Dan 2015)*”. Skripsi..
- El, Junusi Rahman. 2020. *COSO-Based Internal Control: Efforts towards Good University Governance*. Journal of Islamic Accounting and Finance Research. Vol. 2 No. 1.
- Farieda, Awwaliyah Noor, dkk, 2019. *The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance*. Journal of Islamic Accounting and Finance Research. Vol. 1 No. 1.
- Lubis, Farida Khairani. 2017. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatra Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM). Vol. 4 No. 3.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Melatunan, Melsiano Yosias. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong*. Jurnal EMBA, Vol. 7 No. 3.
- Nurudin. 2020. *The Effect of Work Motivation on Performance with Job Satisfaction as an Intervening Variable in the Faculty of Islamic Economics and Business UIN Walisongo Semarang*. BMAJ: Business Management Analysis Journal. Vol. 2 No. 1.
- Pranomo, Joko. 2012. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Surakarta*. Jurnal Artikel.

- Purnomo, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti. Vol. 7 No. 13.
- Ridha, Ainul. 2018. *Pengaruh Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Aceh*. Jurnal Simen.
- Sari, Ifrita Indah dan Imawati Yousida. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.
- Sartika, Novi. 2019. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. Jurnal Inovasi Bisnis 7.
- Sodik, S. S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Supina, Sino D. 2015. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat*. artikel Skripsi.
- Susanti, Diyah Iput. 2016. *Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Vol. 1 No. 53.
- Trihani, I. 2017. *Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah*. Jurnal Artikel.
- Zelmayanti, R. 2015. *Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Sektor Pemerintahan di Indonesia*. JRAK, Vol. 6 No. 1.
- Aamalia, Dwi. (2019, Juni 13). *Jurnal Blog*. Retrieved Maret 31, 2020, from Jurnal Blog: <https://www.jurnal.id>
- Abdul, H. A. (2015, February 16). *wikiapbn.org*. Retrieved April 1, 2020, from wikiapbn.org: <https://www.wikiapbn.org>
- Ayu. (2018, Oktober 12). *Ukirama*. Retrieved Maret 31, 2020, from Ukirama.com: <https://ukirama.com>

Banjar, B. K. (2017, Agustus 8). *Bpkad @banjarkab.go.id*. Retrieved Desember 8, 2020, from [bpkad.banjarkab.go.id](https://bpkad.banjarkab.go.id): <https://bpkad.banjarkab.go.id>

Danial, O. M. (2020, Mei 18). *Jendela Informatika Kota Bandung*. Retrieved Desember 22, 2020, from [Humas.bandung.go.id](https://humas.bandung.go.id): <https://humas.bandung.go.id>

Diklat, A. (2015, Februari 24). *diklat.semarangkota.go.id*. Retrieved Desember 18, 2020, from [diklat.semarangkota](http://diklat.semarangkota.go.id): <http://diklat.semarangkota.go.id>

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59>

PERBUP-53-2015. (2015). *Patent No. 53*. Blora.

## Lampiran

### **Daftar Pertanyaan Wawancara dan Riset**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Kabupaten Blora (BPPKAD) yang ditetapkan oleh Bupati?
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sudah berjalan sekitar 5 tahun, apakah dalam kurun waktu tersebut masih ada kendala dari segi SDM dan SDA?
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual memberikan peluang lebih besar terhadap BLU untuk memperoleh pendapatan secara maksimal, apakah selama kurun waktu 5 tahun ini memberikan pengaruh terhadap pendapat daerah?
4. Bagaimana menentukan penganggaran untuk belanja daerah?
5. Tujuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual untuk mengelola keuangan dengan lebih mandiri, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut pengamatan bapak/ibu, apakah tujuan tersebut telah tercapai?
6. Berkaitan dengan pertanyaan point sebelumnya, yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual bertujuan untuk mengelola keuangan lebih mandiri, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu apa yang membedakan penerapan SAP berbasis kas dengan SAP berbasis akrual?
7. Apakah dari pengelolaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual juga memberikan dampak terhadap pembangunan dan ekonomi di Blora?
8. Dari data laporan keuangan yang telah disajikan selama tahun 2016-2019, pada tahun 2017 ternyata ada penurunan pendapatan asli daerah. Faktor apa yang mempengaruhi menurunnya pendapatan?
9. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pemerintah setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari tahun ke tahun?
10. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ketika ditinjau dari rasio-rasio keuangan (rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio pertumbuhan atau perkembangan pendapatan setiap tahun, rasio ekonomi, rasio keserasian belanja ?
11. Apa kelebihan penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan?

12. Apa kekurangan penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan?

## Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/fax (024) 7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : B-2380/Un.10.5/D1/PP.00.9/11/2020

05 November 2020

Lamp. :

Hal : Pemohonan Ijin Pra Riset / Penelitian

Kedada Yth :  
Kepala BAPPEDA Kabupaten  
Blora Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin pra riset kepada :

Nama	: Shoimul Kharimah
Nim	: 1705046053
Semester	: VII
Jurusan / Prodi	: S.1 Akuntansi Syariah
Alamat	: Desa Ngampon Rt/Rw 01/01, Kec. Jepon, Kab. Blora
Tujuan Penelitian	: Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi	: Analisis Kinerja Keuangan Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah di Kabupaten Blora
Waktu Penelitian	: 10 November 2020
Lokasi Penelitian	: Kantor BPPKAD Kabupaten Blora, Jl. Gatot Subtoto No. 111, Kajangansawan, Sonorejo, Kec. Blora, Kab. Blora

Demikian surat permohonan pra riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Lembaga,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

# Lampiran 1

## Laporan Keuangan Tahun 2011

KABUPATEN BLORA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011					
Nomor Uraian	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan 2011	Realisasi 2011	Rp	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	987.415.000,00	1.007.778.828,00	20.363.828,00	102,36
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	58.400,000,00	67.001.798,00	8.601.798,00	114,74
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.500,140,00	11.177.372,00	677.232,00	106,41
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.774,340,00	8.748.660,79	974.320,79	112,31
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.885,500,00	5.884.026,73	1.998.526,73	152,36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.240,020,00	41.211.739,48	6.971.719,48	119,17
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	897.002.600,00	921.112.310,15	24.109.710,15	102,58
1.2.1	Transfer Pemeliharaan Patal - Dana Pembinaan	707.146.410,00	722.370.724,00	15.224.314,00	102,12
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	69.254,170,00	74.541.836,00	5.287.666,00	107,42
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Air)	13.566,410,00	13.569.113,70	2.703,30	99,29
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	547.165,700,00	547.165,700,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	77.099,930,00	77.099,930,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemeliharaan Patal - Lainnya	166.799,480,00	166.799,480,00	0,00	100,00
1.2.2.1	Dana Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyelesaian	166.799,480,00	166.799,480,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemeliharaan Patal - Lainnya	23.006,010,00	32.386.106,15	9.380.096,15	142,97
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.797,340,00	32.735,411,04	9.938.071,04	142,29
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	241,670,00	250.674,75	8.996,75	3,72
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	31.960,340,00	28.641.411,70	(3.318.928,30)	89,59
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.838,000,00	22.071,700,00	20.233.700,00	11,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	30.122,340,00	6.569,711,70	(23.552.628,30)	21,79
	<b>Jumlah</b>	987.415.000,00	1.007.778.828,00	20.363.828,00	102,36
2	<b>BELANJA</b>	1.072.010.048,00	925.812.780,00	(146.197.268,00)	86,36
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	842.809.480,00	818.040.111,00	(24.769.369,00)	97,08
2.1.1	Belanja Pegawai	425.008,940,00	411.532,249,00	(13.476,700,00)	97,04
2.1.2	Belanja Barang	131.355,682,750,00	121.743,730,00	(9.611.952,750,00)	92,31
2.1.3	Belanja Bunga	600,000,00	44.209,800,00	43.609,800,00	7,37
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	10.007,390,00	9.391,382,00	(616,008,00)	93,36
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.436,340,00	33.137,046,70	9.700,706,70	41,39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	42.421,000,00	41.989,522,00	(431.478,00)	99,00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	229.667,369,450,00	108.029,471,211,00	(121.637,898,239,00)	47,03
2.2.1	Belanja Tanah	38,75,000,00	1.983,443,100,00	1.944.693,100,00	47,60
2.2.2	Belanja Peralatan dan Meubel	49,576,091,750,00	20,913,433,00	(28.662.658,750,00)	42,19
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	60,712,340,00	54,377,211,794,00		



# Laporan keuangan tahun 2012

KABUPATEN BLORA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012						
(Dalam Rupiah)						
Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Jumlah (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan 2012	Realisasi 2012 (Audited)	Rp	%	Realisasi 2011
13	<b>1 PENDAPATAN</b>	1.077.817.861.267,00	1.127.245.001.473,00	49.427.240.206,00	104,59	1.007.775.882.838,00
14						
15	<b>1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	61.400.000.000,00	81.987.007.133,00	20.587.007.133,00	133,53	67.021.769.902,00
16	1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	9.846.848.000,00	11.486.783.665,00	1.639.935.665,00	116,65	11.177.375.259,00
17	1.1.1.2 Pendapatan Restribusi Daerah	7.980.979.000,00	8.817.557.815,00	836.578.815,00	110,48	8.746.660.794,00
18	1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.660.000.000,00	5.758.248.478,00	1.098.248.478,00	123,57	5.884.626.373,00
19	1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.912.173.000,00	55.924.417.175,00	17.012.244.175,00	143,72	41.213.107.476,00
20						
21	<b>1.2 PENDAPATAN TRANSFER</b>	996.042.943.267,00	966.382.432.390,00	30.399.480.123,00	109,24	912.170.186,00
22	1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penimbangan	818.748.541.194,00	817.542.087.931,00	(1.206.453.263,00)	99,85	712.375.079.294,00
23	1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	77.665.953.764,00	74.248.121.221,00	(3.417.832.543,00)	95,60	74.541.856.590,00
24	1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	13.032.297.430,00	16.123.876.710,00	2.191.379.280,00	115,73	13.569.113.704,00
25	1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	673.160.330.000,00	673.160.330.000,00	0,00	100,00	547.169.709.000,00
26	1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	53.989.760.000,00	53.989.760.000,00	0,00	100,00	77.094.400.000,00
27						
28	1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	82.934.000.000,00	105.705.570.000,00	22.836.570.000,00	127,54	166.799.485.080,00
29	1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.2.2.2 Dana Penyesuaian	82.934.000.000,00	105.705.570.000,00	22.836.570.000,00	127,54	166.799.485.080,00
31						
32	1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	34.340.402.073,00	43.069.765.459,00	8.729.363.386,00	125,42	32.938.136.812,00
33	1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.208.382.073,00	42.951.827.489,00	8.743.245.416,00	125,56	32.735.411.044,00
34	1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	131.820.000,00	117.937.970,00	(13.882.030,00)	89,47	202.725.768,00
35						
36	<b>1.3 LAJ-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	80.374.718.000,00	78.875.570.950,00	(1.499.147.050,00)	98,13	28.841.411.750,00
37	1.3.1 Pendapatan Hibah	2.082.928.000,00	1.511.525.750,00	(571.402.250,00)	72,57	257.071.750,00
38	1.3.2 Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.3.3 Pendapatan Lainnya	78.291.790.000,00	77.364.045.200,00	(927.744.800,00)	98,82	28.384.340.000,00
40						
41	<b>Jumlah</b>	<b>1.077.817.861.267,00</b>	<b>1.127.245.001.473,00</b>	<b>49.427.240.206,00</b>	<b>104,59</b>	<b>1.007.775.882.838,00</b>
42						
43	<b>2 BELANJA</b>	1.224.955.234.985,00	1.125.135.368.559,00	(99.819.866.426,00)	91,85	925.821.278.064,00
44						
45	<b>2.1 BELANJA OPERASI</b>	940.692.072.385,00	900.315.389.400,00	(40.376.682.985,00)	95,71	818.040.151.153,00
46	2.1.1 Belanja Pegawai	698.717.304.863,00	676.524.892.037,00	(22.192.412.826,00)	96,82	611.532.246.402,00
47	2.1.2 Belanja Barang	135.996.677.922,00	124.495.374.965,00	(11.501.302.957,00)	91,54	121.743.703.651,00
48	2.1.3 Belanja Bunga	40.000.000,00	35.884.428,00	(4.115.572,00)	89,71	44.209.800,00
49	2.1.4 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2.1.5 Belanja Hibah	54.704.579.600,00	48.433.593.070,00	(6.268.986.530,00)	88,54	9.591.262.000,00
51	2.1.6 Belanja Bantuan Sosial	3.222.000.000,00	3.200.500.000,00	(21.500.000,00)	99,33	3.137.046.708,00
52	2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan	48.011.600.000,00	47.623.144.900,00	(388.455.100,00)	99,19	41.989.652.592,00
53	2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54						
55	<b>2.2 BELANJA MODAL</b>	274.790.162.600,00	219.107.694.569,00	(55.682.468.031,00)	79,74	105.829.479.211,00
56	2.2.1 Belanja Tanah	492.198.000,00	424.520.000,00	(67.678.000,00)	86,25	1.593.643.100,00
57	2.2.2 Belanja Perawatan dan Mesin	45.753.660.100,00	37.657.603.484,00	(8.096.056.616,00)	82,31	23.091.343.937,00
58	2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	82.312.829.000,00	79.777.770.640,00	(2.535.058.360,00)	96,92	34.377.221.794,00
59	2.2.4 Belanja Jalan, Ingsi dan Jembatan	124.440.529.500,00	81.456.793.250,00	(42.983.736.250,00)	65,46	43.847.419.000,00
60	2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	21.381.146.000,00	19.414.698.695,00	(1.966.447.305,00)	90,80	596.271.180,00
61	2.2.6 Belanja Aset Lainnya	409.800.000,00	376.109.500,00	(33.690.500,00)	91,78	323.580.000,00
62						
63	<b>2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	947.300.000,00	5.712.284.990,00	(3.760.715.410,00)	60,30	1.951.647.700,00
64	2.3.1 Belanja Tidak Terduga	947.300.000,00	5.712.284.990,00	(3.760.715.410,00)	60,30	1.951.647.700,00
65						
66	<b>2.4 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2.4.1 Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68	2.4.1.2 Bagi Hasil Restribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
69	2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70						
71	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.224.955.234.985,00</b>	<b>1.125.135.368.559,00</b>	<b>(99.819.866.426,00)</b>	<b>91,85</b>	<b>925.821.278.064,00</b>
73						
74	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(147.137.373.718,00)</b>	<b>2.109.832.914,00</b>	<b>149.247.206.632,00</b>	<b>(1,43)</b>	<b>81.954.604.774,00</b>
75						
76	<b>3 PEMBAYAAN</b>					
77						
78	<b>3.1 PENERIMAAN DAERAH</b>	167.368.273.718,00	167.339.631.335,00	(28.642.383,00)	99,98	87.362.326.902,00
79	3.1.1 Penggantian Bisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	165.834.273.718,00	165.834.273.716,00	(2,00)	100,00	87.077.736.490,00
80	3.1.2 Pencanaran Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
81	3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
82	3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-
83	3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-
84	3.1.6 Penerimaan Pinjaman Daerah	1.446.000.000,00	1.315.880.419,00	(130.119.581,00)	91,00	-
85	3.1.7 Penerimaan Kembali Dana Bergulir	85.000.000,00	189.477.200,00	104.477.200,00	215,32	284.590.412,00
86	<b>Jumlah</b>	<b>167.368.273.718,00</b>	<b>167.339.631.335,00</b>	<b>(28.642.383,00)</b>	<b>99,98</b>	<b>87.362.326.902,00</b>
87						
88	<b>3.2 PENGELUARAN DAERAH</b>	20.230.700.000,00	19.931.167.624,00	(299.532.376,00)	98,52	3.482.657.958,00
89	3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90	3.2.2 Pembentukan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.862.000.000,00	3.862.000.000,00	0,00	100,00	3.362.000.000,00
91	3.2.3 Pembayaran Pokok Utang	70.700.000,00	70.657.958,00	(42.042,00)	99,94	70.657.958,00
92	3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-
93	3.2.5 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	16.298.000.000,00	15.998.509.666,00	(299.490.334,00)	98,16	50.000.000,00
94	3.2.6 Dana Talangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
95	3.2.7 Pembentukan Pinjaman Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	-
96	<b>Jumlah</b>	<b>20.230.700.000,00</b>	<b>19.931.167.624,00</b>	<b>(299.532.376,00)</b>	<b>98,52</b>	<b>3.482.657.958,00</b>
97						
98	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>147.137.373.718,00</b>	<b>147.408.463.711,00</b>	<b>270.889.993,00</b>	<b>100,18</b>	<b>83.796.668.944,00</b>
99						
100	<b>3.3 Bisa Lebih Pembayaan Anggaran (SILPA)</b>	0,00	149.518.096.625,00	149.518.096.625,00	-	165.834.273.718,00

# Laporan keuangan tahun 2013



Lampiran 1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLORA  
NOMOR ... TAHUN 2013  
**KABUPATEN BOLORA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Ribu)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Jumlah (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2013 (Audited)	Rp	%	
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.275.152.498.888,00	1.252.799.168.113,00	(17.446.889.915,00)	101,88	1.127.248.001.478,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	78.000.000.000,00	95.792.786.972,00	(17.792.786.972,00)	122,04	81.947.007.831,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.304.874.000,00	15.300.161.722,00	(2.995.287.722,00)	118,79	1.486.703.645,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.250.000.000,00	11.847.449.020,00	(1.597.449.020,00)	116,42	8.871.350.915,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.145.000.000,00	6.165.994.267,00	(794.967,00)	100,01	6.782.484.78,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.499.126.000,00	41.880.581.063,00	(6.618.544.937,00)	127,09	39.924.417.15,00
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.222.094.992.888,00	1.196.561.818.341,00	(17.471.823.042,00)	101,84	944.382.423.990,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	889.341.716.000,00	907.624.680.000,00	(18.282.864.000,00)	101,80	817.442.007.931,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	45.381.776.000,00	78.484.397.962,00	(33.102.621.962,00)	150,01	74.488.131.231,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumbah Saja Alam)	16.458.174.000,00	16.035.376.207,00	422.797.793,00	96,98	14.238.970.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	753.800.000.000,00	753.800.000.000,00	0,00	100,00	879.180.500.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	54.891.890.000,00	54.892.000.000,00	(110,00)	100,00	53.889.760.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lain-lain	185.992.786.000,00	185.992.786.000,00	0,00	100,00	193.730.700.000,00
1.2.2.1	Dana Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Pengamanan	185.992.786.000,00	185.992.786.000,00	0,00	100,00	193.730.700.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	46.753.978.888,00	57.244.584.077,00	(10.490.605.189,00)	110,47	43.084.763,99,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.753.978.888,00	51.691.784.077,00	(4.937.805.189,00)	110,88	42.943.877,499,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lain-lain	0,00	542.799.900,00	(542.799.900,00)	0,00	17.986.970,00
1.3	<b>LAPORAN PENDAPATAN YANG SAH</b>	750.630.000.000,00	800.584.900,00	1.707.940.000,00	77,38	788.750.990,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.281.430.000,00	1.058.930.200,00	222.500.000,00	77,88	1.311.320.70,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lain-lain	737.177.500.000,00	47.000.700.000,00	690.176.800.000,00	77,82	777.440.000.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.421.803.734.888,00	1.376.484.042.114,00	108.271.619.254,00	92,78	1.121.103.889,00
2.1	<b>BELANJA OPERAS</b>	1.119.880.648.877,00	1.088.088.438.592,00	81.692.210.285,00	94,80	990.103.889,00
2.1.1	Belanja Pegawai	816.111.299.900,00	778.877.838.636,00	39.233.461.264,00	95,20	876.349.203,00
2.1.2	Belanja Barang	158.862.432.527,00	140.323.043.846,00	17.539.388.681,00	88,48	134.952.749.500,00
2.1.3	Belanja Bunga	60.000.000,00	47.044.113,00	12.955.887,00	68,41	30.842,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	95.441.000.000,00	92.430.000.000,00	3.011.000.000,00	94,18	88.353.800,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	84.800.000.000,00	4.194.500.000,00	80.605.500.000,00	69,78	1.200.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	82.841.000.000,00	81.971.370.757,00	869.629.243,00	99,14	47.423.144.900,00
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	296.626.080.011,00	265.655.998.862,00	30.970.081.149,00	87,81	219.107.894.549,00
2.2.1	Belanja Tanah	4.028.872.000,00	1.134.105.390,00	2.894.766.610,00	27,90	424.500.000,00
2.2.2	Belanja Perbaikan dan Merenovasi	82.247.964.411,00	80.844.959.811,00	1.403.004.600,00	83,00	87.857.804.889,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.862.336.000,00	44.768.108.811,00	40.094.227.189,00	51,54	70.777.704,00
2.2.4	Belanja Jalan, Angkutan dan Jembatan	210.942.180.000,00	192.494.844.370,00	18.447.335.630,00	91,24	8.146.782.390,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.257.080.000,00	984.74.180,00	2.692.335.820,00	74,26	154.488.645,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	900.000.000,00	234.812.000,00	665.188.000,00	24,86	876.390.000,00
2.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUA</b>	5.971.000.000,00	0,00	5.971.000.000,00	0,00	6.712.284.990,00
2.3.1	Belanja Tidak Terbaca	5.971.000.000,00	0,00	5.971.000.000,00	0,00	5.712.284.990,00
2.4	<b>TRANSFER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	TRANSFER BANTU HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.12	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.13	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.14	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.15	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.16	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.17	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.19	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.20	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.21	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.23	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.26	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.27	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.28	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.29	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.31	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.32	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.33	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.34	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.35	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.37	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.38	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.39	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.41	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.42	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.43	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.44	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.46	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.47	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.48	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.49	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.50	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.51	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.52	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.54	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.55	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.56	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.57	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.58	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.59	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.61	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.62	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.63	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.64	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.65	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.66	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.67	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.68	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.69	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.70	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.71	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.72	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.73	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.74	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.75	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.76	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.77	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.78	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.79	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.82	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83	Transfer Lain-lain	0,00	0,00	0,00		


# Laporan Keuangan 2014

KABUPATEN BLORA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMBUNY DENGAN 31 DESEMBER 2014						
(Dalam Rupiah)						
Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang/Bertambah		Jumlah (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2014	Rp	%	
18						Realisasi 2013 (Audited)
19	<b>1 PENDAPATAN</b>	1,475,077,050.00	1,316,480,834.00	(158,596,216.00)	90.00	1,292,791,198.00
20						
21	<b>1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	119,794,230.00	144,724,199.00	(24,934,140.00)	120.84	95,192,786.00
22	1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	22,501,933.00	26,310,742.00	(3,808,809.00)	116.92	15,330,167.00
23	1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	15,011,032.00	15,066,762.00	(55,730.00)	101.26	11,647,448.00
24	1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7,676,262.00	7,791,290.00	(114,928.00)	100.68	6,166,942.00
25	1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74,515,973.00	95,315,865.00	(20,800,892.00)	127.87	61,849,019.00
26						
27	<b>1.2 PENDAPATAN TRANSFER</b>	1,274,518,915.00	1,171,756,635.00	(102,762,280.00)	92.01	1,196,618,121.00
28	1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	960,148,430.00	924,574,108.00	(35,574,322.00)	96.29	901,824,609.00
29	1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	51,216,750.00	47,848,037.00	(3,368,713.00)	93.43	78,666,197.00
30	1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	23,850,750.00	21,716,875.00	(2,133,875.00)	91.05	16,035,567.00
31	1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	42,887,400.00	42,887,400.00	0.00	100.00	73,830,000.00
32	1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	41,146,000.00	41,146,000.00	0.00	100.00	63,492,000.00
33	1.2.1.5 Lain-lain Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lain-lain	246,906,170.00	246,906,170.00	0.00	100.00	195,992,700.00
35	1.2.2.1 Dana Operasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	1.2.2.2 Dana Perimbangan	246,906,170.00	246,906,170.00	0.00	100.00	195,992,700.00
37						
38	1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	64,990,000.00	64,990,000.00	0.00	100.00	51,744,954.00
39	1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64,990,000.00	64,990,000.00	0.00	100.00	51,690,780.00
40	1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273,664.00
41						
42	<b>1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	800,282,910.00	800,282,910.00	0.00	100.00	1,024,584,000.00
43	1.3.1 Pendapatan Hibah	1,870,000.00	1,431,163.00	(438,837.00)	76.53	1,000,000.00
44	1.3.2 Pendapatan Dana Prasarana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	1.3.3 Pendapatan Lain-lain	792,512,910.00	798,851,747.00	6,338,837.00	99.89	1,024,584,000.00
46	<b>Jumlah</b>	1,475,077,050.00	1,316,480,834.00	(158,596,216.00)	90.00	1,292,791,198.00
47						
48	<b>2 BELANJA</b>	1,396,363,922.89	1,484,280,931.48	87,916,908.59	106.29	1,318,484,342.14
49						
50	<b>2.1 BELANJA OPERASIONAL</b>	1,282,784,492.29	1,332,071,294.00	49,286,801.71	103.85	1,096,028,443.00
51	2.1.1 Belanja Pegawai	592,582,838.76	656,002,598.00	63,419,759.24	110.71	778,773,868.00
52	2.1.2 Belanja Barang	194,884,027.484	196,886,916.308	1,992,888.824	99.98	1,462,028,484.00
53	2.1.3 Belanja Bunga	15,000.00	14,713.58	(286.42)	98.09	47,844.13
54	2.1.4 Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2.1.5 Belanja Hibah	96,481,841.028	89,471,805.000	(7,010,036.028)	92.72	82,420,000.00
56	2.1.6 Belanja Bantuan Sosial	4,011,500.000	3,943,000.000	(68,500.000)	98.11	4,190,000.00
57	2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan	61,710,000.000	60,900,448.000	(809,552.000)	98.79	61,971,270.00
58	2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59						
60	<b>2.2 BELANJA MODAL</b>	84,284,002.954	89,519,742.48	5,235,739.43	106.21	290,553,998.00
61	2.2.1 Belanja Tanah	5,937,011.000	4,528,000.000	(1,409,011.000)	76.28	1,241,000.00
62	2.2.2 Belanja Perbaikan dan Mesin	44,819,064.413	53,114,443.000	8,295,378.587	118.51	30,443,000.00
63	2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	45,945,944.141	45,000,000.000	(945,944.141)	98.16	44,768,000.00
64	2.2.4 Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	296,084,790.000	329,057,391.000	33,972,601.000	111.12	192,888,457.00
65	2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	7,792,472.100	2,655,648.000	(5,136,824.100)	34.21	619,163.00
66	2.2.6 Belanja Aset Lainnya	4,554,750.000	4,518,150.000	(36,600.000)	99.23	32,441,200.00
67	2.3 BELANJA TRANSFER	600,000.00	0.00	(600,000.00)	0.00	0.00
68	2.3.1 Belanja Titik Tembak	600,000.00	0.00	(600,000.00)	0.00	0.00
69	<b>Jumlah</b>	1,396,363,922.89	1,484,280,931.48	87,916,908.59	106.29	1,318,484,342.14
70						
71	<b>2.4 TRANSFER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2.4.1 TRANSFER BAKU HASIL KE DESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	<b>Jumlah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77						
78	<b>Jumlah Belanja</b>	1,396,363,922.89	1,484,280,931.48	87,916,908.59	106.29	1,318,484,342.14
79						
80	<b>Sisa Lebih</b>	(119,951,728.00)	48,275,211.00	(168,226,939.00)	40.24	(258,488,681.00)
81						
82	<b>3 PEMBIAYAAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83						
84	<b>3.1 PEMBIAYAAN DAERAH</b>	125,574,972.89	120,681,930.63	(4,893,042.26)	96.17	130,886,990.00
85	3.1.1 Pengeluaran-lain Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	120,493,228.365	120,493,228.365	(0.00)	100.00	145,810,000.00
86	3.1.2 Peredaran Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	3.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	3.1.4 Pemenuhan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	3.1.5 Pemenuhan Kembali Perhitungan Anggaran Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	3.1.6 Pemenuhan Piutang Daerah	4,911,200.249	0.00	(4,911,200.249)	0.00	104,776,990.00
91	3.1.7 Pemenuhan Kembali Dana Bergilir	276,771.634	188,702.266	(88,069.368)	68.21	82,527,000.00
92	<b>Jumlah</b>	125,574,972.89	120,681,930.63	(4,893,042.26)	96.17	130,886,990.00
93						
94	<b>3.2 PEMBIAYAAN DAERAH</b>	6,670,000.00	6,670,000.00	0.00	100.00	4,700,000.00
95	3.2.1 Pembiayaan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	3.2.2 Pembiayaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,670,000.00	6,670,000.00	0.00	100.00	4,700,000.00
97	3.2.3 Pembiayaan Pihak Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	3.2.4 Pembiayaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	3.2.5 Pembiayaan Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	3.2.6 Dana Talangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	3.2.7 Pembiayaan Piutang Dana Bergilir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	<b>Jumlah</b>	6,670,000.00	6,670,000.00	0.00	100.00	4,700,000.00
103						
104	<b>Pembiayaan Neto</b>	119,951,728.00	116,011,211.00	(3,940,517.00)	96.68	146,181,290.00
105						
106	<b>3.3 Sila Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	0.00	142,287,924.49	142,287,924.49	0.00	120,493,228.365
107						
108						

# Laporan keuangan 2015


KABUPATEN BLORA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015						
						(dalam Rupiah)
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Jumlah (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2015	Rp	%	Realisasi 2014 (Audited)
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	1	1.713.966,077.000,00	1.648.791.900.900,00	65.177.176.100,00	96,29	1.616.483.008.634,00
20						
21	1.1	137.370.000,00,00	136.402.954.637,00	(967.045.363,00)	113,88	144.724.149.929,00
22	1.1.1	27.534.300,00,00	31.850.405.477,00	4.316.105.477,00	114,88	26.116.142.599,00
23	1.1.2	8.401.000,00,00	9.797.437.107,00	1.396.437.107,00	104,11	75.344.745.092,00
24	1.1.3	7.007.400,00,00	7.008.111.521,00	708.711,521,00	96,98	7.751.229.785,00
25	1.1.4	3.420.300,00,00	3.420.300,00,00	0,00	100,00	3.420.300,00,00
26	1.2	1.500.822.407,00,00	1.416.388.723.988,00	(84.433.683.012,00)	94,40	1.391.175.721.981,00
27	1.2.1	1.048.448.433,00,00	1.019.665.182.124,00	(28.783.250.876,00)	97,23	974.074.061.181,00
28	1.2.1.1	78.743.711,00,00	83.165.932.839,00	4.422.221.828,00	105,74	67.843.037.228,00
29	1.2.1.2	17.233.120,00,00	13.556.170.669,00	(3.676.949.331,00)	78,13	21.716.521.833,00
30	1.2.1.3	848.676.102,00,00	848.676.102,00,00	0,00	100,00	823.874.639,00,00
31	1.2.1.4	303.527.760,00,00	561.116.400,00,00	257.588.640,00	94,78	61.140.640,00,00
32	1.2.2	255.398.131,00,00	204.318.500,00,00	(51.079.631,00,00)	80,00	246.609.117,00,00
33	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.2.2.2	255.398.131,00,00	204.318.500,00,00	(51.079.631,00,00)	80,00	246.609.117,00,00
35	1.2.3	190.850.410,00,00	192.807.364.812,00	1.956.954.812,00	97,88	89.892.547,00,00
36	1.2.3.1	91.443.730,00,00	91.157.203.779,00	(286.526.221,00)	99,76	89.892.547,00,00
37	1.2.3.2	100.000,00,00	1.051.163.633,00	1.051.163.633,00	1.051,16	147.133,00,00
38	1.2.4	7.007.400,00,00	7.007.400,00,00	0,00	100,00	7.007.400,00,00
39	1.3	75.394.412,00,00	75.804.328.227,00	409.916,227,00	99,82	80.383.046.424,00
40	1.3.1	1.134.540,00,00	987.362.927,00	(147.177.073,00)	87,06	1.430.105,00,00
41	1.3.2	74.259.872,00,00	74.817.000,00,00	557.128,00,00	100,88	78.952.941,00,00
42	1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	76.143.000,00,00
44	1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		1.713.966,077.000,00	1.648.791.900.900,00	65.177.176.100,00	96,29	1.616.483.008.634,00
47						
48	2	1.870.830.095.491,00	1.886.767.339.618,00	15.937.244.127,00	99,80	1.868.208.871.148,00
49						
50	2.1	1.523.506.482.761,00	1.540.890.391.256,00	17.383.908.495,00	97,99	1.530.071.249.902,00
51	2.1.1	1.013.588.705,50,00	885.381.381.048,00	(128.207.324.452,00)	87,33	858.332.586.795,00
52	2.1.2	189.482.403.411,00	183.870.606.830,00	(5.611.796.581,00)	97,03	136.096.181.000,00
53	2.1.3	100.000,00,00	62.949,18,00	(37.050.811,00)	62,95	147.133,00,00
54	2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2.1.5	134.281.073.779,00	101.804.706.660,00	(32.476.367.119,00)	75,79	83.473.008.534,00
56	2.1.6	837.120,00,00	842.790,00,00	5.670,00,00	99,91	3.962.000,00,00
57	2.1.7	393.232.070,00,00	393.232.070,00,00	0,00	100,00	80.500.004.032,00
58	2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2.2	346.504.646.730,00	325.177.948.362,00	(21.326.748.368,00)	94,18	335.151.702.249,00
60	2.2.1	888.477,30,00	5.485.903,00,00	4.597.425,70,00	61,78	6.528.888,00,00
61	2.2.2	862.821.773,30,00	762.089.980,00,00	(100.731.793,30,00)	88,34	811.149.473,30,00
62	2.2.3	345.644.848,26,00	323.932.507,77,00	(21.712.340,49,00)	95,19	433.848.854,00,00
63	2.2.4	164.618.583,30,00	160.047.721,23,00	(4.570.862,07,00)	97,21	229.057.091.300,00
64	2.2.5	130.436.352,00,00	791.609.660,00,00	461.173.308,00,00	95,77	2.055.492.839,00
65	2.2.6	700.000,00,00	891.123,00,00	191.123,00,00	95,99	431.681.900,00
66	2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2.2.8	831.000,00,00	0,00	(831.000,00,00)	0,00	0,00
68	2.2.9	831.000,00,00	0,00	(831.000,00,00)	0,00	0,00
69	2.3	187.030.099.891,00	1.886.767.339.618,00	204.246.139.727,00	99,89	1.868.208.871.148,00
70	2.3.1	3.500,00,00,00	3.200,00,00,00	(300,00,00,00)	91,43	0,00
71	2.3.2	3.500,00,00,00	3.200,00,00,00	(300,00,00,00)	91,43	0,00
72	2.3.3	3.500,00,00,00	3.200,00,00,00	(300,00,00,00)	91,43	0,00
73	2.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2.3.5	3.500,00,00,00	3.200,00,00,00	(300,00,00,00)	91,43	0,00
75	2.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	2.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2.3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2.3.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		3.500,00,00,00	3.200,00,00,00	(300,00,00,00)	91,43	0,00
82						
83		1.874.330.095.491,00	1.886.767.339.618,00	12.437.244.127,00	99,80	1.868.208.871.148,00
84						
85		1.603.267.282.481,00	1.571.703.871,00	(31.563.410,00)	98,03	1.587.157.289,00
86						
87	3					
88	3.1	163.437.782.491,00	163.564.188.116,00	126.405,625,00	100,08	120.883.183,00,00
89	3.1.1	163.287.782.491,00	163.445.572,00,00	157.790,511,00	100,11	120.494.263,00,00
90	3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.7	150.000,00,00	115.112.439,00	(34.887.561,00)	77,37	186.479.329,00,00
96	3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		163.437.782.491,00	163.564.188.116,00	126.405,625,00	100,08	120.883.183,00,00
98	3.2	307.000,00,00	307.047.958,00	47.958,00,00	100,01	56.704.877,958,00
99	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.2.2	300.000,00,00	300.000,00,00	0,00	100,00	3.000.000,00,00
101	3.2.3	70.000,00,00	70.047.958,00	47.958,00,00	99,94	70.627.958,00,00
102	3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		307.000,00,00	307.047.958,00	47.958,00,00	100,01	56.704.877,958,00
109						
110		160.367.282.491,00	160.493.327.558,00	126.040,067,00	100,08	119.012.325.195,00
111	3.3	180.367.282.491,00	179.917.488.840,00	(449.803.651,00)	99,81	168.187.192.491,00
112						

## Laporan keuangan tahun 2016

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015</b>							
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2016	LEBIH/KURANG	PROSE NTASE	REALISASI 2015
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.1.A.</b>	<b>1.943.031.160.462,00</b>	<b>1.858.187.916.237,00</b>	<b>(84.843.244.225,00)</b>	<b>95,63</b>	<b>1.516.483.308.534,00</b>
2							
3	<b>PENDAPATAN ASLI</b>	<b>6.1.A.a.</b>	<b>175.200.000.000,00</b>	<b>171.277.522.706,00</b>	<b>(3.922.477.294,00)</b>	<b>97,76</b>	<b>156.402.924.037,00</b>
4	Pendapatan Pajak Daerah	6.1.A.a.1	38.987.363.000,00	41.046.674.606,00	2.059.311.606,00	105,28	31.550.409.677,00
5	Pendapatan Retribusi	6.1.A.a.2	9.984.663.000,00	9.778.925.650,00	(205.737.350,00)	97,94	9.787.637.317,00
6	Pendapatan Hasil	6.1.A.a.3	8.105.616.000,00	8.105.618.518,00	2.518,00	100,00	7.005.811.121,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli	6.1.A.a.4	118.122.358.000,00	112.346.303.932,00	(5.776.054.068,00)	95,11	108.059.065.922,00
8							
9	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.1.A.b.</b>	<b>1.598.574.259.362,00</b>	<b>1.518.683.687.233,00</b>	<b>(79.890.572.129,00)</b>	<b>95,00</b>	<b>1.416.584.723.936,00</b>
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>6.1.A.b.1.</b>	<b>1.354.773.638.000,00</b>	<b>1.331.611.361.558,00</b>	<b>(23.162.276.442,00)</b>	<b>98,29</b>	<b>1.019.665.153.124,00</b>
11	Dana Bagi Hasil Pajak	6.1.A.b.1.1	66.954.256.000,00	77.523.014.477,00	10.568.758.477,00	115,79	59.165.952.059,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.1.A.b.1.2	36.501.230.000,00	33.327.730.081,00	(3.173.499.919,00)	91,31	13.556.179.065,00
13	Dana Alokasi Umum	6.1.A.b.1.3	943.325.498.000,00	943.325.498.000,00	-	100,00	848.823.612.000,00
14	Dana Alokasi khusus	6.1.A.b.1.4	307.992.654.000,00	277.435.119.000,00	(30.557.535.000,00)	90,08	98.119.410.000,00
15							
16	Transfer Pemerintah Pusat Dana Otonomi Khusus	6.1.A.b.2.	1.358.580.000,00	1.358.580.000,00	-	100,00	204.318.505.000,00
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
18	Dana Penyesuaian	6.1.A.b.2.	-	-	-	-	204.318.505.000,00
19							
20	Transfer Pemerintah	6.1.A.b.3.	242.442.041.362,00	185.713.745.675,00	(56.728.295.687,00)	76,60	192.601.065.812,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.1.A.b.3.1	129.376.741.362,00	86.019.445.675,00	(43.357.295.687,00)	66,49	91.151.205.776,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	6.1.A.b.3.2	113.065.300.000,00	99.694.300.000,00	(13.371.000.000,00)	-	101.449.860.036,00
23							
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>6.1.A.c.</b>	<b>169.256.901.100,00</b>	<b>168.226.706.298,00</b>	<b>(1.030.194.802,00)</b>	<b>99,39</b>	<b>75.804.252.927,00</b>
25	Pendapatan Hibah	6.1.A.c.1	1.383.572.100,00	353.377.298,00	(1.030.194.802,00)	25,54	987.382.927,00
26	Pendapatan Dana Desa	6.1.A.c.2	167.873.329.000,00	167.873.329.000,00	-	100,00	74.816.870.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
28	Pendapatan Lainnya	6.1.A.c.3	-	-	-	-	-
29	<b>Jumlah</b>		<b>1.943.031.160.462,00</b>	<b>1.858.187.916.237,00</b>	<b>84.843.244.225,00</b>	<b>95,63</b>	<b>1.648.791.900.900,00</b>

30							
31	<b>BELANJA</b>	<b>6.1.B</b>	<b>2.074.109.349.302,00</b>	<b>1.945.723.193.287,00</b>	<b>(128.386.156.015,00)</b>	<b>93,81</b>	<b>1.666.767.939.618,00</b>
32							
33	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.1.B.a.</b>	<b>1.590.178.195.973,00</b>	<b>1.510.769.369.299,00</b>	<b>(79.408.826.674,00)</b>	<b>95,01</b>	<b>1.340.590.391.256,00</b>
34	Belanja Pegawai	6.1.B.a.1	1.004.098.934.681,00	964.603.085.691,00	(39.495.848.990,00)	96,07	885.381.361.048,00
35	Belanja Barang	6.1.B.a.2	237.483.683.942,00	213.375.491.306,00	(24.108.192.636,00)	89,85	151.870.836.830,00
36	Belanja Bunga	6.1.B.a.3	-	-	-	-	6.295.918,00
37	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
38	Belanja Hibah	6.1.B.a.4	43.774.251.750,00	31.053.916.647,00	(12.720.335.103,00)	70,94	101.656.770.660,00
39	Belanja Bantuan Sosial	6.1.B.a.5	2.489.801.600,00	2.238.542.655,00	(251.258.945,00)	89,91	6.637.900.000,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	6.1.B.a.6	302.331.524.000,00	299.498.333.000,00	(2.833.191.000,00)	99,06	195.037.226.800,00
41							
42	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.1.B.b.</b>	<b>482.906.153.329,00</b>	<b>434.953.823.988,00</b>	<b>(47.952.329.341,00)</b>	<b>90,07</b>	<b>326.177.548.362,00</b>
43	Belanja Tanah	6.1.B.b.1	6.158.879.500,00	999.762.500,00	(5.159.117.000,00)	16,23	5.485.950.930,00
44	Belanja Peralatan dan	6.1.B.b.2	87.716.789.759,00	75.066.884.787,00	(12.649.904.972,00)	85,58	76.208.090.860,00
45	Belanja Gedung dan	6.1.B.b.3	131.844.820.034,00	114.655.089.905,00	(17.189.730.129,00)	86,96	82.953.050.177,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan	6.1.B.b.4	252.153.525.036,00	241.904.979.308,00	(10.248.545.728,00)	95,94	160.047.723.735,00
47	Belanja Aset Tetap	6.1.B.b.5	3.022.139.000,00	635.825.888,00	(2.386.313.112,00)	21,04	791.609.660,00
48	Belanja Aset Lainnya	6.1.B.b.6	2.010.000.000,00	1.691.281.600,00	(318.718.400,00)	84,14	691.123.000,00
49							
50	<b>BELANJA TIDAK</b>	<b>6.1.B.c</b>	<b>1.025.000.000,00</b>	-	<b>(1.025.000.000,00)</b>	-	-
51	Belanja Tidak Terduga	6.1.B.c	1.025.000.000,00	-	(1.025.000.000,00)	-	-
52	<b>Jumlah</b>		<b>2.074.109.349.302,00</b>	<b>1.945.723.193.287,00</b>	<b>(128.386.156.015,00)</b>	<b>93,81</b>	<b>1.666.767.939.618,00</b>
53	<b>TRANSFER</b>	<b>6.1.C</b>	<b>6.106.300.000,00</b>	<b>6.093.261.000,00</b>	-	-	<b>3.200.000.000,00</b>
54	<b>TRANSFER BAGI HASIL</b>	<b>6.1.C.a</b>	<b>6.106.300.000,00</b>	<b>6.093.261.000,00</b>	-	-	<b>3.200.000.000,00</b>
55	Bagi Hasil Pajak	6.1.C.a.1	-	-	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi	6.1.C.a.2	6.106.300.000,00	6.093.261.000,00	(13.039.000,00)	-	3.200.000.000,00
57	Bagi Hasil Pendapatan	6.1.C.a.3	-	-	-	-	-
58	<b>Jumlah</b>		<b>6.106.300.000,00</b>	<b>6.093.261.000,00</b>	-	-	<b>3.200.000.000,00</b>
59							
60	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>2.080.215.649.302,00</b>	<b>1.951.816.454.287,00</b>	<b>(128.386.156.015,00)</b>	<b>93,83</b>	<b>1.669.967.939.618,00</b>
61							
62	<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>(137.184.488.840,00)</b>	<b>(93.628.538.050,00)</b>	<b>43.555.950.790,00</b>	<b>68,25</b>	<b>(21.176.038.718,00)</b>
63							
64	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>6.1.D</b>	<b>137.184.488.840,00</b>	<b>137.276.763.840,00</b>	<b>92.275.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>160.493.527.558,00</b>
65							
66	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>6.1.D.a</b>	<b>139.417.488.840,00</b>	<b>139.509.763.840,00</b>	<b>92.275.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>163.564.185.516,00</b>
67	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	6.1.d.a.1	139.317.488.840,00	139.318.488.840,00	1.000.000,00	100,00	163.448.573.077,00
68	Pencairan Dana Cadangan	6.1.d.a.2	-	-	-	-	-
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.1.d.a.3	-	-	-	-	-
70	Penerimaan Pinjaman	6.1.d.a.4	-	-	-	-	-
71	Penerimaan Kembali	6.1.d.a.5	-	-	-	-	-
72	Penerimaan Piutang	6.1.d.a.6	-	-	-	-	-
73	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	6.1.d.a.7	100.000.000,00	191.275.000,00	91.275.000,00	191,28	115.612.439,00
74	<b>Jumlah</b>		<b>139.417.488.840,00</b>	<b>139.509.763.840,00</b>	<b>92.275.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>163.564.185.516,00</b>
75							
76	<b>PENGELUARAN</b>	<b>6.1.D.b</b>	<b>2.233.000.000,00</b>	<b>2.233.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>	<b>3.070.657.958,00</b>
77	Pembentukan Dana	6.1.d.b.1	-	-	-	-	-
78	Penyertaan Modal	6.1.d.b.2	2.233.000.000,00	2.233.000.000,00	-	100,00	3.000.000.000,00
79	Pembayaran Pokok Utang	6.1.d.b.3	-	-	-	-	-
80	Pemberian Pinjaman	6.1.d.b.4	-	-	-	-	-
81	Pembayaran Utang Kepada Dana Talangan	6.1.d.b.5	-	-	-	-	70.657.958,00
82	Dana Talangan	6.1.d.b.6	-	-	-	-	-
83	Pemberian Pinjaman Dana	6.1.d.b.7	-	-	-	-	-
84	<b>Jumlah</b>		<b>2.233.000.000,00</b>	<b>2.233.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>	<b>3.070.657.958,00</b>
85							
86	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>6.1.E</b>	<b>137.184.488.840,00</b>	<b>137.276.763.840,00</b>	<b>92.275.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>160.493.527.558,00</b>
87							
88	<b>Sisa Lebih Pembiayaan</b>	<b>6.1.F</b>	-	<b>43.648.225.790,00</b>	<b>43.648.225.790,00</b>	-	<b>139.317.488.840,00</b>


## Laporan Keuangan Tahun 2017

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016</b>							
(Dalam Rupiah)							
<b>N O</b>	<b>URAIAN</b>	<b>REF</b>	<b>ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI 2017</b>	<b>LEBIH/KURANG</b>	<b>%</b>	<b>REALISASI 2016</b>
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.A.</b>	<b>2.062.082.706.756,00</b>	<b>2.013.829.444.230,00</b>	<b>48.253.262.526,00</b>	<b>97,66</b>	<b>1.858.187.916.237,00</b>
2							
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.A.a.</b>	<b>268.303.892.156,00</b>	<b>280.042.019.102,00</b>	<b>(11.738.126.946,00)</b>	<b>104,37</b>	<b>171.277.522.706,00</b>
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.a.1	42.869.866.000,00	48.450.528.271,00	(5.580.662.271,00)	113,02	41.046.674.606,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.a.2	8.690.329.000,00	8.370.133.408,00	320.195.592,00	96,32	9.778.925.650,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.a.3	21.758.000.000,00	21.582.775.295,00	175.224.705,00	99,19	8.105.618.518,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.1.A.a.4	194.985.697.156,00	201.638.582.128,00	(6.652.884.972,00)	103,41	112.346.303.932,00
8							
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.A.b.</b>	<b>1.578.760.202.000,00</b>	<b>1.518.790.298.934,00</b>	<b>59.969.903.066,00</b>	<b>96,20</b>	<b>1.518.683.687.233,00</b>
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.A.b.1.</b>	<b>1.391.681.852.000,00</b>	<b>1.348.442.240.943,00</b>	<b>43.239.611.057,00</b>	<b>96,89</b>	<b>1.331.611.361.558,00</b>
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.1.1	90.452.858.748,00	83.336.482.499,00	7.116.376.249,00	92,13	77.523.014.477,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.b.1.2	32.791.285.252,00	29.903.508.129,00	2.887.777.123,00	91,19	33.327.730.081,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.A.b.1.3	926.754.302.000,00	926.754.302.000,00	-	100,00	943.325.498.000,00
14	Dana Alokasi khusus	5.1.A.b.1.4	341.683.406.000,00	308.447.948.315,00	33.235.457.685,00	90,27	277.435.119.000,00
15							
16	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Otonomi Khusus</b>	<b>5.1.A.b.2.</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>1.358.580.000,00</b>
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
18	Dana Penyesuaian	5.1.A.b.2.	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-	-
19							
20	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.1.A.b.3.</b>	<b>179.578.350.000,00</b>	<b>162.848.057.991,00</b>	<b>16.730.292.009,00</b>	<b>90,68</b>	<b>185.713.745.675,00</b>
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.3.1	115.000.000.000,00	100.677.858.991,00	14.322.141.009,00	87,55	86.019.445.675,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.A.b.3.2	64.578.350.000,00	62.170.199.000,00	2.408.151.000,00	96,27	99.694.300.000,00
23							
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG BUKAN ASLI</b>	<b>5.1.A.c.</b>	<b>215.018.612.600,00</b>	<b>214.997.126.194,00</b>	<b>21.486.406,00</b>	<b>78,24</b>	<b>168.226.706.298,00</b>
25	Pendapatan Hibah	5.1.A.c.1	916.588.600,00	895.102.194,00	21.486.406,00	97,66	353.377.298,00
26	Pendapatan Dana Desa	5.1.A.c.2	214.102.024.000,00	214.102.024.000,00	-	100,00	167.873.329.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
28	Pendapatan Lainnya	5.1.A.c.3					
29	<b>Jumlah</b>		<b>2.062.082.706.756,00</b>	<b>2.013.829.444.230,00</b>	<b>48.253.262.526,00</b>	<b>97,66</b>	<b>1.858.187.916.237,00</b>

31	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.B</b>	<b>2.087.573.699.546,00</b>	<b>1.975.921.281.358,00</b>	<b>#####</b>	<b>93,21</b>	<b>1.945.723.193.287,00</b>
32							
33	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.B.a.</b>	<b>1.637.367.627.779,00</b>	<b>1.555.056.725.336,00</b>	<b>82.310.902.443,00</b>	<b>92,27</b>	<b>1.510.769.369.299,00</b>
34	Belanja Pegawai	5.1.B.a.1	953.525.723.995,00	898.801.735.230,00	54.723.988.765,00	94,26	964.603.085.691,00
35	Belanja Barang	5.1.B.a.2	304.710.844.984,00	283.511.244.049,00	21.199.600.935,00	93,04	213.375.491.306,00
36	Belanja Bunga	5.1.B.a.3	-	-	-	-	-
37	Belanja Subsidi						
38	Belanja Hibah	5.1.B.a.4	21.765.245.800,00	21.284.317.057,00	480.928.743,00	97,79	31.053.916.647,00
39	Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.a.5	1.184.948.000,00	868.948.000,00	316.000.000,00	73,33	2.238.542.655,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.B.a.6	356.180.865.000,00	350.590.481.000,00	5.590.384.000,00	98,43	299.498.333.000,00
41							
42	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.B.b.</b>	<b>449.206.071.767,00</b>	<b>420.864.556.022,00</b>	<b>28.341.515.745,00</b>	<b>93,69</b>	<b>434.953.823.988,00</b>
43	Belanja Tanah	5.1.B.b.1	1.810.000.000,00	1.013.625.240,00	796.374.760,00	56,00	999.762.500,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.b.2	82.916.113.767,00	73.146.321.613,00	9.769.792.154,00	88,22	75.066.884.787,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.B.b.3	123.027.973.800,00	119.526.613.519,00	3.501.360.281,00	97,15	114.655.089.905,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.b.4	235.063.697.200,00	225.981.820.750,00	9.081.876.450,00	96,14	241.904.979.308,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.b.5	6.188.287.000,00	1.017.961.900,00	5.170.325.100,00	16,45	635.825.888,00
48	Belanja Aset Lainnya	5.1.B.b.6	200.000.000,00	178.213.000,00	21.787.000,00	89,11	1.691.281.600,00
49							
50	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.B.c</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51	Belanja Tidak Terduga	5.1.B.c	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-
52	<b>Jumlah</b>		<b>2.087.573.699.546,00</b>	<b>1.975.921.281.358,00</b>	<b>#####</b>	<b>94,65</b>	<b>1.945.723.193.287,00</b>
53	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.C</b>	<b>5.426.233.000,00</b>	<b>5.426.200.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.093.261.000,00</b>
54	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DAERAH</b>	<b>5.1.C.a</b>	<b>5.426.233.000,00</b>	<b>5.426.200.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.093.261.000,00</b>
55	Bagi Hasil Pajak	5.1.C.a.1	-	-	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi	5.1.C.a.2	5.426.233.000,00	5.426.200.000,00	33.000,00	100,00	6.093.261.000,00
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.C.a.3	-	-	-	-	-
58	<b>Jumlah</b>		<b>5.426.233.000,00</b>	<b>5.426.200.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.093.261.000,00</b>
59	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>		<b>2.092.999.932.546,00</b>	<b>1.981.347.481.358,00</b>	<b>#####</b>	<b>94,67</b>	<b>1.951.816.454.287,00</b>
60	<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>(30.917.225.790,00)</b>	<b>32.481.962.872,00</b>	<b>(63.399.188.662,00)</b>	<b>#####</b>	<b>(93.628.538.050,00)</b>
61							
62	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.D</b>	<b>30.917.225.790,00</b>	<b>31.003.715.890,00</b>	<b>(86.490.100,00)</b>	<b>100,28</b>	<b>137.276.763.840,00</b>
63							
64	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5.1.D.a</b>	<b>43.648.225.790,00</b>	<b>43.734.715.890,00</b>	<b>(86.490.100,00)</b>	<b>100,20</b>	<b>139.509.763.840,00</b>
65	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan	5.1.d.a.1	43.648.225.790,00	43.648.225.790,00	-	100,00	139.318.488.840,00
66	Pencairan Dana Cadangan	5.1.d.a.2	-	-	-	-	-
67	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	5.1.d.a.3	-	-	-	-	-
68	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.d.a.4	-	-	-	-	-
69	Penerimaan Kembali Pemberian	5.1.d.a.5	-	-	-	-	-
70	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.d.a.6	-	-	-	-	-
71	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.d.a.7	-	86.490.100,00	(86.490.100,00)	-	191.275.000,00
72	<b>Jumlah</b>		<b>43.648.225.790,00</b>	<b>43.734.715.890,00</b>	<b>(86.490.100,00)</b>	<b>100,20</b>	<b>139.509.763.840,00</b>
73							
74	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5.1.D.b</b>	<b>12.731.000.000,00</b>	<b>12.731.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>2.233.000.000,00</b>
75	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.d.b.1	-	-	-	-	-
76	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.d.b.2	12.731.000.000,00	12.731.000.000,00	-	100,00	2.233.000.000,00
77	Pembayaran Pokok Utang	5.1.d.b.3	-	-	-	-	-
78	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.d.b.4	-	-	-	-	-
79	Pembayaran Utang Kepada Pihak	5.1.d.b.5	-	-	-	-	-
80	Dana Talangan	5.1.d.b.6	-	-	-	-	-
81	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	5.1.d.b.7	-	-	-	-	-
82	<b>Jumlah</b>		<b>12.731.000.000,00</b>	<b>12.731.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>2.233.000.000,00</b>
83							
84	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>5.1.E</b>	<b>30.917.225.790,00</b>	<b>31.003.715.890,00</b>	<b>(86.490.100,00)</b>	<b>100,28</b>	<b>137.276.763.840,00</b>
85							
86	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>5.1.F</b>	<b>-</b>	<b>63.485.678.762,00</b>	<b>(63.485.678.762,00)</b>	<b>-</b>	<b>43.648.225.790,00</b>




## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017							
(Dalam Rupiah)							
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2018	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2017
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.A.</b>	<b>2.143.637.059.677,00</b>	<b>2.120.671.434.967,00</b>	<b>22.965.624.710,00</b>	<b>98,93</b>	<b>2.013.829.444.230,00</b>
2							
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.A.a.</b>	<b>199.199.813.000,00</b>	<b>203.182.795.054,00</b>	<b>(3.982.982.054,00)</b>	<b>102,00</b>	<b>280.042.019.102,00</b>
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.a.1	50.083.488.000,00	53.816.734.848,00	(3.733.246.848,00)	107,45	48.450.528.271,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.a.2	9.145.761.000,00	8.638.971.957,00	506.789.043,00	94,46	8.370.133.408,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.a.3	12.124.000.000,00	8.112.978.480,00	4.011.021.520,00	66,92	21.582.775.295,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.A.a.4	127.846.564.000,00	132.614.109.769,00	(4.767.545.769,00)	103,73	201.638.582.128,00
8							
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.A.b.</b>	<b>1.632.213.115.000,00</b>	<b>1.607.847.575.930,00</b>	<b>24.365.539.070,00</b>	<b>98,51</b>	<b>1.518.790.298.934,00</b>
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.A.b.1.</b>	<b>1.398.565.930.000,00</b>	<b>1.375.550.409.408,00</b>	<b>23.015.520.592,00</b>	<b>98,35</b>	<b>1.348.442.240.943,00</b>
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.1.1	122.780.255.000,00	98.847.733.591,00	23.932.521.409,00	80,51	83.336.482.499,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.b.1.2	10.053.193.000,00	17.015.980.402,00	(6.962.787.402,00)	169,26	29.903.508.129,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.A.b.1.3	926.754.302.000,00	926.682.649.031,00	71.652.969,00	99,99	926.754.302.000,00
14	Dana Alokasi khusus	5.1.A.b.1.4	338.978.180.000,00	333.004.046.384,00	5.974.133.616,00	98,24	308.447.948.315,00
15							
16	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.1.A.b.2.</b>	<b>26.250.000.000,00</b>	<b>26.250.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
18	Dana Penyesuaian	5.1.A.b.2.	26.250.000.000,00	26.250.000.000,00	-	-	7.500.000.000,00
19							
20	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.1.A.b.3.</b>	<b>207.397.185.000,00</b>	<b>206.047.166.522,00</b>	<b>1.350.018.478,00</b>	<b>99,35</b>	<b>162.848.057.991,00</b>
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.3.1	100.893.835.000,00	102.733.000.522,00	(1.839.165.522,00)	101,82	100.677.858.991,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.A.b.3.2	106.503.350.000,00	103.314.166.000,00	3.189.184.000,00	97,01	62.170.199.000,00
23							
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.A.c.</b>	<b>312.224.131.677,00</b>	<b>309.641.063.983,00</b>	<b>2.583.067.694,00</b>	<b>68,86</b>	<b>214.997.126.194,00</b>
25	Pendapatan Hibah	5.1.A.c.1	82.490.294.677,00	79.907.226.983,00	2.583.067.694,00	96,87	895.102.194,00
26	Pendapatan Dana Desa	5.1.A.c.2	229.733.837.000,00	229.733.837.000,00	-	100,00	214.102.024.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
28	Pendapatan Lainnya	5.1.A.c.3	-	-	-	-	-
29	<b>Jumlah</b>		<b>2.143.637.059.677,00</b>	<b>2.120.671.434.967,00</b>	<b>22.965.624.710,00</b>	<b>98,93</b>	<b>2.013.829.444.230,00</b>

31	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.B</b>	<b>2.197.084.738.439,00</b>	<b>2.110.687.561.459,00</b>	<b>86.397.176.980,00</b>	<b>89,93</b>	<b>1.975.921.281.358,00</b>
32							
33	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.B.a.</b>	<b>1.656.036.218.737,00</b>	<b>1.611.247.782.326,00</b>	<b>44.788.436.411,00</b>	<b>93,90</b>	<b>1.555.056.725.336,00</b>
34	Belanja Pegawai	5.1.B.a.1	941.111.832.422,00	907.414.544.888,00	33.697.287.534,00	96,42	898.801.735.230,00
35	Belanja Barang	5.1.B.a.2	315.028.174.315,00	306.144.209.238,00	8.883.965.077,00	97,18	283.511.244.049,00
36	Belanja Bunga	5.1.B.a.3	-	-	-	-	-
37	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
38	Belanja Hibah	5.1.B.a.4	37.298.308.000,00	35.541.525.200,00	1.756.782.800,00	95,29	21.284.317.057,00
39	Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.a.5	1.857.575.000,00	1.436.500.000,00	421.075.000,00	77,33	868.948.000,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.B.a.6	360.740.329.000,00	360.711.003.000,00	29.326.000,00	99,99	350.590.481.000,00
41							
42	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.B.b.</b>	<b>540.298.519.702,00</b>	<b>499.439.779.133,00</b>	<b>40.858.740.569,00</b>	<b>92,44</b>	<b>420.864.556.022,00</b>
43	Belanja Tanah	5.1.B.b.1	1.707.000.000,00	1.291.794.500,00	415.205.500,00	75,68	1.013.625.240,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.b.2	104.418.520.113,00	83.619.034.319,00	20.799.485.794,00	80,08	73.146.321.613,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.B.b.3	139.678.440.300,00	136.540.415.855,00	3.138.024.445,00	97,75	119.526.613.519,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.b.4	290.132.874.789,00	273.758.728.009,00	16.374.146.780,00	94,36	225.981.820.750,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.b.5	4.115.684.500,00	4.033.333.450,00	82.351.050,00	98,00	1.017.961.900,00
48	Belanja Aset Lainnya	5.1.B.b.6	246.000.000,00	196.473.000,00	49.527.000,00	79,87	178.213.000,00
49							
50	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.B.c</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51	Belanja Tidak Terduga	5.1.B.c	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	-
52	<b>Jumlah</b>		<b>2.197.084.738.439,00</b>	<b>2.110.687.561.459,00</b>	<b>86.397.176.980,00</b>	<b>96,07</b>	<b>1.975.921.281.358,00</b>
53	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.C</b>	<b>6.038.000.000,00</b>	<b>5.788.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>5.426.200.000,00</b>
54	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>5.1.C.a</b>	<b>6.038.000.000,00</b>	<b>5.788.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>5.426.200.000,00</b>
55	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.1.C.a.1	6.038.000.000,00	5.788.000.000,00	-	-	5.426.200.000,00
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.C.a.2	-	-	-	-	-
58	<b>Jumlah</b>		<b>6.038.000.000,00</b>	<b>5.788.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>5.426.200.000,00</b>
59	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>		<b>2.203.122.738.439,00</b>	<b>2.116.475.561.459,00</b>	<b>86.647.176.980,00</b>	<b>96,07</b>	<b>1.981.347.481.358,00</b>
60	<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>(59.485.678.762,00)</b>	<b>4.195.873.508,00</b>	<b>(63.681.552.270,00)</b>	<b>(7,05)</b>	<b>32.481.962.872,00</b>
61							
62	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.D</b>	<b>59.485.678.762,00</b>	<b>59.608.030.710,00</b>	<b>(122.351.948,00)</b>	<b>100,21</b>	<b>31.003.715.890,00</b>
63							
64	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5.1.D.a</b>	<b>63.485.678.762,00</b>	<b>63.608.030.710,00</b>	<b>(122.351.948,00)</b>	<b>100,19</b>	<b>43.734.715.890,00</b>
65	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	5.1.d.a.1	63.485.678.762,00	63.485.678.762,00	-	100,00	43.648.225.790,00
66	Pencairan Dana Cadangan	5.1.d.a.2	-	-	-	-	-
67	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.d.a.3	-	-	-	-	-
68	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.d.a.4	-	-	-	-	-
69	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.d.a.5	-	-	-	-	-
70	Penerimaan Plutang Daerah	5.1.d.a.6	-	-	-	-	-
71	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.d.a.7	-	122.351.948,00	(122.351.948,00)	-	86.490.100,00
72	<b>Jumlah</b>		<b>63.485.678.762,00</b>	<b>63.608.030.710,00</b>	<b>(122.351.948,00)</b>	<b>100,19</b>	<b>43.734.715.890,00</b>
73							
74	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5.1.D.b</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>12.731.000.000,00</b>
75	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.d.b.1	-	-	-	-	-
76	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.d.b.2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00	12.731.000.000,00
77	Pembayaran Pokok Utang	5.1.d.b.3	-	-	-	-	-
78	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.d.b.4	-	-	-	-	-
79	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	5.1.d.b.5	-	-	-	-	-
80	Dana Talangan	5.1.d.b.6	-	-	-	-	-
81	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	5.1.d.b.7	-	-	-	-	-
82	<b>Jumlah</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>12.731.000.000,00</b>
83							
84	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>5.1.E</b>	<b>59.485.678.762,00</b>	<b>59.608.030.710,00</b>	<b>(122.351.948,00)</b>	<b>100,21</b>	<b>31.003.715.890,00</b>
85							
86	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>5.1.F</b>	<b>-</b>	<b>63.803.904.218,00</b>	<b>(63.803.904.218,00)</b>	<b>-</b>	<b>63.485.678.762,00</b>

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018</b>							
(Dalam Rupiah)							
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2019	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2018
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.A.	<b>2.270.553.942.488,00</b>	<b>2.240.970.020.181,00</b>	<b>29.583.922.307,00</b>	<b>98,70</b>	<b>2.120.671.434.967,00</b>
2							
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.A.a.	<b>218.052.934.811,00</b>	<b>246.863.066.484,00</b>	<b>(28.810.131.673,00)</b>	<b>113,21</b>	<b>203.182.795.054,00</b>
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.a.1	53.846.000.000,00	61.320.811.636,00	(7.474.811.636,00)	113,88	53.816.734.848,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.a.2	9.661.955.000,00	9.265.329.919,00	396.625.081,00	95,89	8.638.971.957,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diniskahkan	5.1.A.a.3	13.780.000.000,00	13.805.331.392,00	(25.331.392,00)	100,18	8.112.978.480,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.A.a.4	140.764.979.811,00	162.471.593.537,00	(21.706.613.726,00)	115,42	132.614.109.769,00
8							
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.A.b.	<b>1.684.979.973.000,00</b>	<b>1.631.536.944.197,00</b>	<b>53.443.028.803,00</b>	<b>96,83</b>	<b>1.607.847.575.930,00</b>
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	5.1.A.b.1.	<b>1.497.944.208.000,00</b>	<b>1.441.716.460.262,00</b>	<b>56.227.747.738,00</b>	<b>96,25</b>	<b>1.375.550.409.408,00</b>
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.1.1	102.983.374.000,00	81.955.082.770,00	21.028.291.230,00	79,58	98.847.733.591,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.b.1.2	44.676.766.000,00	37.893.211.206,00	6.783.554.794,00	84,82	17.015.980.402,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.A.b.1.3	966.572.992.000,00	966.559.787.000,00	13.205.000,00	100,00	926.682.649.031,00
14	Dana Alokasi khusus	5.1.A.b.1.4	383.711.076.000,00	355.308.379.286,00	28.402.696.714,00	92,60	333.004.046.384,00
15							
16	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	5.1.A.b.2.	<b>34.200.765.000,00</b>	<b>34.200.765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>26.250.000.000,00</b>
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
18	Dana Penyesuaian	5.1.A.b.2.	34.200.765.000,00	34.200.765.000,00	-	-	26.250.000.000,00
19							
20	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	5.1.A.b.3.	<b>152.835.000.000,00</b>	<b>155.619.718.935,00</b>	<b>(2.784.718.935,00)</b>	<b>101,82</b>	<b>206.047.166.522,00</b>
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.3.1	106.000.000.000,00	111.276.869.935,00	(5.276.869.935,00)	104,98	102.733.000.522,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.A.b.3.2	46.835.000.000,00	44.342.849.000,00	2.492.151.000,00	94,68	103.314.166.000,00
23							
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.A.c.	<b>367.521.034.677,00</b>	<b>362.570.009.500,00</b>	<b>4.951.025.177,00</b>	<b>98,65</b>	<b>309.641.063.983,00</b>
25	Pendapatan Hibah	5.1.A.c.1	99.267.188.677,00	94.316.163.500,00	4.951.025.177,00	95,01	79.907.226.983,00
26	Pendapatan Dana Desa	5.1.A.c.2	268.253.846.000,00	268.253.846.000,00	-	100,00	229.733.837.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
28	Pendapatan Lainnya	5.1.A.c.3	-	-	-	-	-
29	<b>Jumlah</b>		<b>2.270.553.942.488,00</b>	<b>2.240.970.020.181,00</b>	<b>29.583.922.307,00</b>	<b>98,70</b>	<b>2.120.671.434.967,00</b>

31	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.B</b>	<b>2.321.157.984.406,00</b>	<b>2.195.598.035.903,00</b>	<b>125.559.948.503,00</b>	<b>94,59</b>	<b>2.110.687.561.459,00</b>
32							
33	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.B.a.</b>	<b>1.813.006.952.875,00</b>	<b>1.728.710.689.895,00</b>	<b>84.296.262.980,00</b>	<b>95,35</b>	<b>1.611.247.782.326,00</b>
34	Belanja Pegawai	5.1.B.a.1	978.174.020.588,00	924.532.293.909,00	53.641.726.679,00	94,52	907.414.544.888,00
35	Belanja Barang	5.1.B.a.2	385.553.871.811,00	357.028.347.986,00	28.525.523.825,00	92,60	306.144.209.238,00
36	Belanja Bunga	5.1.B.a.3	-	-	-	-	-
37	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
38	Belanja Hibah	5.1.B.a.4	31.358.805.976,00	29.535.200.000,00	1.823.605.976,00	94,18	35.541.525.200,00
39	Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.a.5	4.544.000.000,00	4.255.000.000,00	289.000.000,00	93,64	1.436.500.000,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.B.a.6	413.376.254.500,00	413.359.848.000,00	16.406.500,00	100,00	360.711.003.000,00
41							
42	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.B.b.</b>	<b>507.651.031.531,00</b>	<b>466.887.346.008,00</b>	<b>40.763.685.523,00</b>	<b>91,97</b>	<b>499.439.779.133,00</b>
43	Belanja Tanah	5.1.B.b.1	18.079.540.000,00	13.969.177.820,00	4.110.362.180,00	77,27	1.291.794.500,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.b.2	109.417.724.336,00	89.508.670.291,00	19.909.054.045,00	81,80	83.619.034.319,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.B.b.3	138.169.822.631,00	134.689.914.700,00	3.479.907.931,00	97,48	136.540.415.855,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.b.4	239.010.069.964,00	225.917.880.879,00	13.092.189.085,00	94,52	273.758.728.009,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.b.5	2.820.874.600,00	2.664.601.954,00	156.272.646,00	94,46	4.033.333.450,00
48	Belanja Aset Lainnya	5.1.B.b.6	153.000.000,00	137.100.364,00	15.899.636,00	89,61	196.473.000,00
49							
50	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.B.c</b>	<b>500.000.000,00</b>	-	<b>500.000.000,00</b>	-	-
51	Belanja Tidak Terduga	5.1.B.c	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-
52	<b>Jumlah</b>		<b>2.321.157.984.406,00</b>	<b>2.195.598.035.903,00</b>	<b>125.559.948.503,00</b>	<b>94,59</b>	<b>2.110.687.561.459,00</b>
53	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.C</b>	<b>6.758.000.000,00</b>	<b>5.941.900.000,00</b>	<b>816.100.000,00</b>	<b>87,92</b>	<b>5.788.000.000,00</b>
54	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>5.1.C.a</b>	<b>6.758.000.000,00</b>	<b>5.941.900.000,00</b>	<b>816.100.000,00</b>	<b>87,92</b>	<b>5.788.000.000,00</b>
55	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.1.C.a.1	6.758.000.000,00	5.941.900.000,00	-	-	5.788.000.000,00
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.C.a.2	-	-	-	-	-
58	<b>Jumlah</b>		<b>6.758.000.000,00</b>	<b>5.941.900.000,00</b>	<b>816.100.000,00</b>	<b>87,92</b>	<b>5.788.000.000,00</b>
59	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>		<b>2.327.915.984.406,00</b>	<b>2.201.539.935.903,00</b>	<b>126.376.048.503,00</b>	<b>94,57</b>	<b>2.116.475.561.459,00</b>
60	<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>(57.362.041.918,00)</b>	<b>39.430.084.278,00</b>	<b>(96.792.126.196,00)</b>	<b>(68,74)</b>	<b>4.195.873.508,00</b>
61							
62	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.D</b>	<b>57.362.041.918,00</b>	<b>58.422.607.092,00</b>	<b>(1.060.565.174,00)</b>	<b>101,85</b>	<b>59.608.030.710,00</b>
63							
64	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5.1.D.a</b>	<b>63.862.041.918,00</b>	<b>63.922.107.092,00</b>	<b>(60.065.174,00)</b>	<b>100,09</b>	<b>63.608.030.710,00</b>
65	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.d.a.1	63.803.904.218,00	63.802.556.826,00	(1.347.392,00)	100,00	63.485.678.762,00
66	Pencairan Dana Cadangan	5.1.d.a.2	-	-	-	-	-
67	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.d.a.3	-	-	-	-	-
68	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.d.a.4	-	-	-	-	-
69	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.d.a.5	-	-	-	-	-
70	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.d.a.6	-	-	-	-	-
71	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.d.a.7	58.137.700,00	119.550.266,00	(61.412.566,00)	-	122.351.948,00
72	<b>Jumlah</b>		<b>63.862.041.918,00</b>	<b>63.922.107.092,00</b>	<b>(62.759.958,00)</b>	<b>100,09</b>	<b>63.608.030.710,00</b>
73							
74	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5.1.D.b</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>5.499.500.000,00</b>	<b>1.000.500.000,00</b>	<b>84,61</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
75	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.d.b.1	-	-	-	-	-
76	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.d.b.2	6.500.000.000,00	5.499.500.000,00	1.000.500.000,00	84,61	4.000.000.000,00
77	Pembayaran Pokok Utang	5.1.d.b.3	-	-	-	-	-
78	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.d.b.4	-	-	-	-	-
79	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	5.1.d.b.5	-	-	-	-	-
80	Dana Talangan	5.1.d.b.6	-	-	-	-	-
81	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	5.1.d.b.7	-	-	-	-	-
82	<b>Jumlah</b>		<b>6.500.000.000,00</b>	<b>5.499.500.000,00</b>	<b>1.000.500.000,00</b>	<b>84,61</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
83							
84	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>5.1.E</b>	<b>57.362.041.918,00</b>	<b>58.422.607.092,00</b>	<b>(1.060.565.174,00)</b>	<b>101,85</b>	<b>59.608.030.710,00</b>
85							
86	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>5.1.F</b>	<b>-</b>	<b>97.852.691.370,00</b>	<b>(97.852.691.370,00)</b>	<b>-</b>	<b>63.803.904.218,00</b>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shoimul Kharimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 15 Januari 1997  
NIM : 1705046053  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Desa Ngampon, RT 01 RW 01, Kecamatan Jepon,  
Kabupaten Blora  
Email : shoimulkharimah@gmail.com  
No.HP : 085693663280

### PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Aisyah Bustanul Athfal 1 (2003-2004)
2. SDN 1 Ngampon (2004-2010)
3. MTs Islamiyah Banjarejo (2010-2013)
4. MA Khozinatu 'Ulum Blora (2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang (2017-Sekarang)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang (2017-2019)
2. Tax Center (2019-2020)

Semarang, 22 April 2021

Shoimul Kharimah

1705046053